



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH**

**RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI DENGAN DIREKTORAT  
JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI,  
DAN DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

- Tahun Sidang : 2023-2024  
Masa Persidangan : IV (Empat)  
Rapat ke- : Ke-8 (Delapan)  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Senin, 25 Maret 2024  
Waktu : Pukul 11.28 – 14.57 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung  
Nusantara 1, Jakarta  
Ketua Rapat : H. Eddy Soeparno, S.H., M.H. / F-PAN / Wakil Ketua  
Komisi VII DPR RI  
Sekretaris Rapat : **Dwiyanti, S.Sos. / Kepala Bagian Sekretariat Komisi  
VII**  
Acara : 1. Progress dan realisasi program PJUTS dan  
AML;  
2. Lain-lain  
Hadir : 26 orang Anggota hadir dari 51 orang Anggota  
Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

**A. Anggota DPR RI:**

**PIMPINAN:**

1. Sugeng Suparwoto/F-Nasdem/Ketua Komisi VII  
DPR RI
2. H. Dony Maryadi Oekon, S.T./F-PDI  
Perjuangan/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.

3. Bambang Haryadi, S.E./F-Gerindra/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
4. H. Eddy Soeparno, S.H., M.H./F-PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:**

5 orang anggota dari 10 anggota:

1. H. Yulian Gunhar, S.H., M.H.
2. H. Naszirul Falah Amru, S.E.
3. H. Andi Ridwan Wittiri, S.H.
4. Mercy Chriesty Barends, S.T.
5. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.

**2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:**

5 orang anggota dari 7 anggota:

1. Drs. Mukhtarudin
2. Ir. Lamhot Sinaga
3. Bambang Hermanto, S.E.
4. Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A., M.Sc.
5. Bambang Patijaya, S.E., M.M.

**3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:**

1 orang anggota dari 6 anggota:

1. Dr. Ramson Siagian

**4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:**

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. Arkanata Akram, S.T., B.E. (Hons) **M.Eng..Sc.**
2. Rico Sia

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. Hj. Ratna Juwita Sari, S.E, M.M.

**6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

5 orang anggota dari 5 anggota:

1. Sartono Hutomo
2. Muhammad Nasir
3. Zulfikar Hamonangan, S.H.
4. Rusda Mahmud
5. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

**7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. Ir. H. Tifatul Sembiring
2. Dr. H. Mulyanto, **M.Eng..**

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

1 orang anggota dari 3 anggota:

1. Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

0 orang anggota dari 1 anggota:

**B. PEMERINTAH/UNDANGAN**

1. Prof. Dr. Eng. Eniya Listiani Dewi (Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia)
2. Ir. Jisman P. Hutajulu, M.M. (Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia)

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Ibu, Bapak, teman-teman Komisi VII, kita bisa mulai, ya. Pak Dirjen, Ibu Dirjen kita bisa mulai, ya.

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang kami hormati Pimpinan dan Ibu, Bapak Anggota Komisi VII DPR RI,  
Yang kami hormati Dirjen EBTKE Kementerian ESDM beserta jajaran,  
Yang kami hormati Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI bersama seluruh jajarannya, serta  
Seluruh hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. bahwa kita bisa datang, berkumpul, hadir di dalam ruangan ini untuk menjalankan tugas-tugas konstitusional kita.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Dirjen Ketenagalistrikan dan Dirjen EBTKE beserta seluruh jajaran yang hadir dalam kesempatan pada pagi menjelang siang hari ini.

Sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi VII DPR RI, pada hari ini kami akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dengan agenda:



1. Progres dan realisasi Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) dan Alat Masak Listrik (AML); dan
2. Lain-lain.

Dalam kesempatan hari ini juga kami karena pertama kali melaksanakan RDP dengan Dirjen EBTKE ada baiknya juga kami bisa mendengarkan apa yang menjadi fokus dan program kerja cepatnya Ibu Dirjen dalam melaksanakan kegiatannya, dalam proses percepatan transisi energi yang ada yang sedang kita laksanakan pada saat ini.

Ibu, Bapak.

Berdasarkan data dari sekretariat Anggota Komisi VII DPR RI yang telah hadir berjumlah 9 Anggota dari 7 Fraksi yang ada, oleh karena itu kuorum telah terpenuhi dan sesuai ketentuan Pasal 276 Ayat (1) yang menyatakan bahwa, setiap rapat DPR RI bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu pimpinan meminta persetujuan anggota Komisi VII DPR RI agar rapat ini dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan dan bersifat terbuka, apa bisa disetujui?

**(RAPAT: SETUJU)**

Atas pesetujuan Anggota Komisi VII DPR RI dan dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* Rapat Dengar Pendapat Komisi VII dengan Dirjen EBTKE dan Dirjen Gatrik Kementerian ESDM RI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT: TERBUKA)**  
**(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.30 WIB)**  
**(KETOK PALU 1 KALI)**

Sebelum melanjutkan rapat ini kami mintakan persetujuan Ibu, Bapak Anggota bahwa rapat ini selesai pada pukul 13.30 atau 2 jam setelah rapat ini dimulai dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kita bersama, apa bisa setuju Ibu, Bapak?

**(RAPAT: SETUJU)**  
**(KETOK PALU 1 KALI)**

Baik.

Ibu, Bapak yang kami hormati.

Sebagaimana kita agendakan pada hari ini dalam rangka membantu masyarakat yang belum teraliri jaringan listrik dari PLN, salah satu solusi yang diberikan adalah adanya Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya atau PJUTS yang diberikan melalui program memiliki jaminan pemeliharaan selama 1 tahun ditambah garansi sistem selama 2 tahun sejak jaminan



pemeliharaan berakhir. Sehingga total 3 tahun jaminan perbaikan ditanggung oleh penyedia.

Pada Tahun Anggaran 2024 PJUTS seharusnya diimplementasikan sebanyak 22.000 titik senilai Rp363 miliar. Sedangkan pokok pembahasan berikutnya kita perjuangkan bersama-sama ada adalah realisasi bantuan alat masak listrik. Pada Tahun Anggaran 2024 melalui program peningkatan elektrifikasi rumah tangga untuk penurunan emisi dan subsidi, *clean cooking* untuk rumah tangga dianggarkan sebanyak 680.000 unit AML senilai 340 miliar.

Nah dari kedua program tersebut, implementasinya tidak dapat berjalan dengan baik dan banyak hambatan yang kita temui di lapangan sehingga tidak dapat berjalan sesuai dengan target yang dicanangkan. Oleh karena itu, Rapat Dengar Pendapat pada hari ini ingin memperoleh penjelasan secara detail terkait kendala, hambatan dan solusi yang telah disampaikan atau telah dirumuskan oleh Dirjen EBTKE dan Dirjen Ketenagalistrikan mengenai program PJUTS dan AML tersebut.

Selanjutnya untuk efektifnya rapat kami persilakan kepada Dirjen EBTKE dan kemudian Pak Dirjen Gatrik untuk menyampaikan pemaparannya kami persilakan. Ibu, saya selalu mengajarkan *ladies first*, Pak, itu, jadi silakan Ibu Dirjen EBTKE, silakan.

**DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Prof. Dr. Eng. ENIYA LISTIANI DEWI):**

Baik, terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Anggota, Bapak, Ibu Anggota Dewan yang saya muliakan,  
Pimpinan, dan  
Rekan-rekan dari EBTKE.

Perkenalkan kembali nama saya Eniya Listiani Dewi menerima amanah sejak minggu lalu untuk menjadi Dirjen EBTKE, mohon kerja samanya.

Bapak Pimpinan, tadi sudah disinggung mengenai kegiatan EBTKE di tahun 2024 yang mengembang tugas sangat menarik, ya, menjadi impian bagi kita semua untuk menghadirkan bauran energi secepat mungkin dan dari ranah energi baru terbarukan.

Dari kegiatan kami di tahun 2023 itu telah banyak juga menghasilkan capaian untuk target dari *biofuel*, dari bauran energi, lalu investasi dan lain sebagainya mungkin pada waktu yang lalu Bapak Menteri sudah menjelaskan.



Saat ini untuk kegiatan di 2024 tentu saja kita juga mempunyai target, di mana kalau di sini kami bisa *share* sedikit adalah mengenai saat ini kami akan mengakselerasi Rancangan Undang-Undang EBTKE yang menjadi tugas juga bagi kami, serta pada kesempatan yang lalu juga telah disinggung konversi kendaraan listrik juga merupakan kegiatan yang akan kami lakukan di 2024. Dan tentu saja selain dari itu berbagai kegiatan yang direncanakan di EBTKE adalah menaikkan sektor PNBP, investasi, dan juga tambahan kapasitas implementasi B35, penurunan intensitas energi, dan lain sebagainya.

Di antaranya kami hari ini juga akan menjelaskan program PJU tenaga surya di tahun 2023 dan rencana 2024. Mohon izin kami akan mulai dengan pembahasan mengenai program PJU tahun 2023.

Bisa kami sampaikan bahwa, dari kegiatan di 2023 ini target dari PJUTS adalah 31.075 unit dan pada saat ini total per hari, per hari ini terpasang 22.785 unit. Jadi dari pagu 473,79 miliar terealisasi 344,64 miliar.

Saya lanjut, spesifikasi PJUTS yang disebutkan di dalam 2023 terdiri dari komponen modul surya, baterai, *solar charge controller*, lampu LED-nya, tiang PJU, dan berikut *box* baterai.

Lanjut, progres pekerjaan PJU tenaga surya kami *update* per hari ini ya, Pak, 24, per kemarin, per kemarin 24 Maret 2024 total jumlah unit yang ditargetkan itu adalah 31.075, di dalam progres per kemarin menjadi sudah terpasang 21.112 titik. Nah dari sini kita berawal dari berkontrak lima paket dan survei juga sudah dilakukan, pengiriman angkur juga sudah dilakukan, pengiriman material utama, serta proses galian dan proses betonisasi sudah diselesaikan namun memang di situ persentase yang kita *update* per kemarin. Progres PJUTS yang terpasang ini 21.112 titik prognosa kami di sampai dengan tanggal 30 Maret adalah sebanyak 22.785 titik atau total sebesar 73,3%.

Menilik dari progres dan *timeline* yang pernah ada lanjutnya saya akan mengutarakan data kontrak pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan pada tahun 2023 terdiri dari 5 paket, lanjut, itu adalah pembangunan PJUTS wilayah Indonesia 1, wilayah Indonesia 2, wilayah Indonesia 3, Indonesia 4 dan Indonesia 5. Tertulis penyedia ada.

**F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):**

Izin interupsi, Pimpinan, sedikit *aja*. Indonesia 1 itu apa, Bu? Indonesia 2 itu apa?

**DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Prof. Dr. Eng. ENIYA LISTIANI DEWI):**



Baik, itu kami sebut pembangunan PJUTS wilayah Indonesia 1 untuk memudahkan kita memasukkan nama pakatnya saja.

**F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):**

Oh, bukan pemetaan (menit 00:10:51) wilayah teritorial?

**DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Prof. Dr. Eng. ENIYA LISTIANI DEWI):**

Bukan, Pak.

**F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):**

Jadi daerah saya di mana, 1, 2, 3 atau enggak tahu, ya.

**DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Prof. Dr. Eng. ENIYA LISTIANI DEWI):**

Baik, nanti bisa kita *share* itu dari satu mungkin Bapak, Ibu Anggota Dewan bisa saja dari beberapa paket, begitu.

Untuk paket pertama ini penyediannya adalah PT Surya Energi Indotama dengan jumlah 5.202 dan paket kedua KSO dari PT Gerbang Multilindo, Multindo Nusantara, serta PT Surya Utama Putra sebanyak 5.189, untuk paket ketiga adalah PT Surya Energi Indotama atau SEI 5.261 unit, untuk paket keempat adalah KSO antara PT Matra dengan PT Waskita 4.955 unit dan paket 5 adalah KSO antara PT Matra dengan PT Inti sebesar 10.468 unit.

Nah di sebelah kanan nomor kontrak itu sebetulnya kami sudah melakukan perpanjangan kontrak, jadi semua diberi kesempatan untuk melanjutkan sampai dengan 30 Maret 2024, minggu ini. Dan melihat *timeline* pengadaan, lanjut, PJUTS untuk 2023 dari paket 1, 2, 3, 4, 5, bisa tertera bahwa sepanjang ada beberapa kontrak yang sudah mulai ditender pada, bahkan *pratender*, ya, biasanya pra, pra-DIPA maaf pra-DIPA itu sejak 8 Desember itu ada paket 3 dan 4 serta mulai kontraknya adalah Februari dan Maret berlangsung sampai dengan tahun 2024, jadi cukup panjang. Nah paket 1 dan 2 itu mulai kontrak sejak Mei hingga sekarang.

Dan yang terakhir adalah paket Indolima itu mulai kontraknya adalah sekitar Juli 2023 hingga sekarang. *Timeline* seperti tersebut dan untuk progres per paket per 2024 kemarin tanggal 24 Maret, *next*, ini kita bisa *update* per kemarin adalah sisa yang belum terpasang di paket 4 dan 5. Untuk paket 1, 2, dan 3 ini prognosa sehingga 30 Maret bisa mencapai 100% walaupun saat ini masih ada sisa yang belum terpasang, *insyaallah* minggu ini bisa diselesaikan. Jadi untuk paket 1, 2, 3 bisa 100%, paket 5 62,7% dan, maaf paket 4 adalah



62,7%, dan paket 5 adalah 38,5%, memang yang paling sedikit adalah paket yang terakhir.

Dan berikut, *next*, proyeksi penyelesaian hingga 30 Maret ini diprediksi bahwa akan diselesaikan, ya, diselesaikan hingga 30 Maret. Kalau dari total yang sudah akan bisa terpasang adalah 22.785 titik dan dari sini kita melihat sisa yang tidak bisa tercapai itu adalah 8.290 titik.

*Next*, melihat peta progres realisasi dari pemasangan PJU, nah ini mungkin wilayah-wilayah Dapil bisa diketahui, ada beberapa di Sumbar ada 0% masih kurang, ya, dan ada beberapa titik mungkin di Sulawesi bagian utara itu juga masih ada yang 0% dan Papua sebagian Papua Barat itu masih 0% dan Papua Pegunungan 0%.

Nah dari kesemuanya kita upayakan ini *update* per kemarin sehingga mungkin nanti *prognose* untuk 2.000 untuk 30 Maret 2024 itu akan ada sedikit perbaikan.

Selanjutnya, untuk strategi penyelesaian. Nah ini di internal kami sudah membahas kita melihat strategi penyelesaian ke depan untuk program PJUTS ini, kita ingin memonitor, *monitoring* harian, harian dari progres pembangunan dan mendorong penyedia untuk mengejar progress pelaksanaan pembangunan sesuai target. Tentu saja penyedia juga telah menambahkan personil dan jumlah tim di lapangan untuk mempercepat, dan untuk penyelesaian PJUTS-nya.

Dalam hal penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas waktu yang ditentukan akhir minggu ini, 30 Maret, maka dilakukan terminasi kontrak dan penyedia terkait, yang terkait diproses *blacklist* sesuai ketentuan perundangan.

Di dalam realisasi terdapat titik PJUTS yang belum direalisasikan yaitu sebanyak 8.290 titik, direncanakan akan diselesaikan dengan menggunakan APBN Tahun Anggaran 2024 melalui proses realokasi anggaran sesuai ketentuan perundangan. Jadi saat ini kami sedang melakukan proses realokasi dan kami mohon Bapak, Ibu Pimpinan, Bapak, Ibu Dewan yang saya muliakan, kita mohon juga koordinasi untuk menentukan titik secara tepat dan tidak mengalami perubahan paling tidak ada di kabupaten dan kota masing-masing.

Demikian yang bisa saya sampaikan untuk strategi penyelesaian ke depan.

Terima kasih.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*



**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Walaikumsalam,*

Silakan lanjut, Pak Dirjen Gatrik.

**DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Ir. JISMAN P. HUTAJULU, M.M):**

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI,  
Yang kami hormati Dirjen EBTKE, dan  
Bapak, Ibu dari Kementerian ESDM.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera untuk kita semua.

Melanjutkan agenda yang kedua, izinkan kami dari Ditjen Ketenagalistrikan memulai dengan paparan pelaksanaan program penyediaan alat memasak listrik berbasis listrik, ya, yang disingkat dengan AML bagi rumah tangga Tahun Anggaran 2023.

*Next*, kami awali dengan penjelasan program AML.

Program AML adalah program pemerintah berupa insentif atau bantuan yang diberikan kepada rumah tangga dengan tujuan mendorong akses energi bersih yang jangkau, andal dan berkelanjutan, mengurangi impor LPG yang digunakan untuk memasak, meningkatkan konsumsi listrik per kapita dan mendukung penggunaan teknologi memasak yang lebih bersih. Targetnya adalah pelanggan 450 PA dan 1.300 PA yang tentunya sudah dengan pelayanan listrik yang 24 jam dan kemudian diharapkan rumah tangga yang akan diberikan itu belum memiliki AML.

Kemudian diusulkan berdasarkan validasi kepala desa atau lurah setempat atau pejabat setinggi atau yang lebih tinggi. Kemudian paket AML terdiri dari AML-nya sendiri yang dapat digunakan untuk menanak dan mengukus, lalu dilengkapi dengan brosur, buku petunjuk penggunaan, serta kartu garansi. Kapasitas AML yang diberikan antara 1,8 sampai 2,2 liter yang memenuhi TKDN tentunya sesuai SNI dan memiliki label hemat energi.

*Next*, nah untuk mengingatkan Kembali, Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati.

Kami jelaskan kronologis perencanaan dan pelaksanaan program AML ini. Program AML dimulai dengan persetujuan Komisi VII DPR RI pada Raker tanggal 22 September 2022 dengan anggaran 340 miliar waktu itu untuk



unitnya 680.000. Kami menindaklanjuti dengan melakukan *trilateral meeting* antara Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Pada rapat 20 Oktober 2022 Bappenas dan Kemenku belum menyetujui anggaran ini karena belum masuk dalam RPJMN dan belum mendapat persetujuan dari banggar DPR. Selanjutnya, anggaran anggaran AML tersebut menjadi *output* cadangan atau OC menunggu surat dari banggar DPR.

Kemudian dilanjutkan dengan *trilateral meeting* tanggal 12 September 2023, program AML akhirnya disetujui untuk dilaksanakan dengan alokasi 500.000 unit dengan anggaran 322 miliar. Kemenkeu juga mensyaratkan kriteria calon penerima harus tidak mempunyai AML dan harus dilakukan kajian dampak pelaksanaan AML. Pada tanggal 25 September 2023 melalui surat Setneg disampaikan persetujuan Bapak Presiden untuk penetapan rancangan Permen ESDM tentang penyediaan AML bagi rumah tangga, yang kemudian tanggal 2 Oktober Permen tersebut resmi diterbitkan menjadi syarat dibukanya blokir anggaran AML.

Program AML dapat dimulai pada tanggal 6 Oktober 2023 dengan memulai proses pengusulan calon penerima manfaat yang dilanjutkan verifikasi dan survei lapangan oleh PLN untuk kemudian ditetapkan sebagai calon penerima AML. Paralel dengan proses tersebut dilakukan proses pengadaan AML melalui e-katalog dan penandatanganan kontrak dimulai dilakukan pada tanggal 29 dan 30 November 2023. Lalu proses distribusi dilakukan pada periode 12 Desember 2023 sampai dengan 13 Februari 2024. Distribusi dapat melewati Tahun Anggaran berjalan dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023.

Selanjutnya, kami jelaskan proses penerimaan data sampai dengan penetapan calon penerima. Data usulan calon penerima kami terima sejak tanggal 20 Oktober 2023 kami mengucapkan terima kasih kepada tenaga ahli DPR RI yang membantu kepala desa atau setingkat untuk menyiapkan usulan calon penerima.

Selanjutnya, dilakukan verifikasi awal atau kami disebut dengan verifikasi *on desk* terkait dengan kelengkapan persyaratan seperti surat validasi desa dan surat pernyataan tidak memiliki AML, serta dilakukan proses *cleansing* duplikasi nama sesuai dengan NIK. Hasil *cleansing* tersebut kami kirimkan ke PLN untuk dilakukan survei atau verifikasi lapangan. Verifikasi lapangan dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian calon penerima dengan alamat, golongan tarif listriknya sesuai, dan bermukim dengan akses listrik 24 jam. Dalam hal ini kami mengupayakan kerja paralel ketika surat pernyataan belum disampaikan tetapi survei lapangan tetap dilakukan.

Untuk data calon penerima yang dinyatakan valid survei lapangan dan lengkap persyaratan ditetapkan sebagai calon penerima melalui keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan. Semua proses diupayakan dapat tertelusur dengan baik dan menjaga *good governance*-nya.



Selanjutnya kami akan menjelaskan terkait jumlah usulan dan realisasi penerima AML. Total usulan yang kami terima sebanyak 811.109 rumah tangga. Melalui verifikasi *on desk* ditemukan 27,5% atau lebih dari 220.000 data duplikasi berdasarkan NIK atau KTP-nya, lalu berdasarkan survei lapangan yang dilakukan oleh PLN terdapat 75,4% dinyatakan valid atau memenuhi kriteria. Selanjutnya dari data valid dicek kembali kelengkapan persyaratan surat validasi dari kepala desa dan pernyataan tidak memiliki AML. Terdapat lebih dari 100.000 data tidak lengkap, sangat disayangkan memang karena keterbatasan waktu, data ini tidak bisa ditetapkan. Tanggal terakhir penetapan adalah tanggal 18 Desember 2023.

Untuk mempercepat distribusi AML, kami menetapkan calon penerima, *next*, ya, penerima secara bertahap paralel dengan survei lapangan, penetapan pertama di tanggal 17 November, yang kedua 22 November, ketiga 27 November, kemudian penetapan terakhir pada tanggal 18 Desember 2023.

Distribusi AML sebanyak 342.621 rumah tangga atau 68,5% dari target awal sebanyak 500.000 mencakup 36 provinsi, 325 kabupaten/kota, 2.460 kecamatan dan 13.000 desa/kelurahan. Alokasi di Pulau Jawa itu lebih dari 56%, hal ini sejalan dengan kondisi sistem Jawa – Bali yang surplus kelistrikan. Selanjutnya,

Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati.

Pengadaan AML 2023 dilakukan melalui e-katalog dengan mempertimbangkan waktu yang terbatas yang tidak dimungkinkan lelang. Selain itu, berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 bahwa, untuk pengadaan produk dalam negeri menggunakan e-katalog.

Terdapat lima merek AML yang memenuhi persyaratan produk dan TKDN yaitu, Cosmos, Miyako, Maspion, Sanken dan Sky. Harga AML bervariasi sesuai dengan merek dan spesifikasi mulai dari harga 249.000 sampai dengan 530.000 dengan komposisi sebagaimana yang ada di dalam tabel. Penetapan ini semata-mata berdasarkan harga terendah dan ketersediaan barang yang ditawarkan pada e-katalog.

Biaya distribusi AML yang dilakukan melalui PT Pos untuk 36 provinsi rata-rata sekitar 133.000 per unit. Harga ini didasarkan harga penawaran yang sudah di bawah harga standar PT Pos atau harga *at cost*. Lalu realisasi total anggaran program AML sebesar 176 miliar dari pagu awal sekitar 322 miliar sisanya sebesar 146 miliar menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau yang disebut dengan SILPA.

Bapak, Ibu yang saya hormati.

Beberapa hal yang mungkin perlu kami klarifikasi dalam pelaksanaan program AML antara lain, yang pertama perlunya validasi kepala desa atau



lurah. Hal ini lebih untuk akuntabilitas pertanggungjawaban penerima AML berdasarkan usulan setingkat kepala desa atau yang lebih, ya, kepala desa *lah* yang mengetahui kondisi masyarakatnya.

Kemudian, perlunya surat pernyataan tidak memiliki AML. Hal ini diperlukan untuk memastikan tujuan program ini dalam meningkatkan konsumsi listrik per kapita, hal ini juga diingatkan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas pada saat rapat *trilateral*.

Kemudian yang ketiga adalah perlunya pengelolaan data calon penerima. Data yang kami terima Bapak, Ibu sekalian, umumnya dalam format foto tulisan tangan, sehingga diperlukan input data agar bisa diproses secara IT. Kami melibatkan lebih dari 100 orang untuk *data entry* yang bekerja selama 2 bulan.

Yang keempat, distribusi AML pada, pada distribusi program AML dilakukan pengawasan langsung oleh Bapak, Ibu Anggota Komisi VII DPR RI untuk memastikan AML diterima oleh masyarakat yang berhak. Yang menjadi tantangan adalah kesesuaian waktu antara PT Pos dan Anggota DPR atau yang mewakili dalam waktu yang singkat selama hanya 2 bulan untuk pendistribusian.

Yang terakhir adalah dalam pelaksanaan program ini kami didampingi oleh Irjen ESDM dan diawasi oleh BPK dan KPK yang selalu memonitor dan mengingatkan kami terkait dengan kepatuhan atau *governance* atas proses pelaksanaannya.

Sebagai penutup, kami jelaskan bahwa telah dilakukan sebanyak 33 kali sosialisasi pendistribusian AML pada bulan Desember 2023 sampai dengan Februari 2024 di 15 provinsi.

Bapak, Ibu yang saya hormati.

Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan program ini belum bisa memenuhi harapan dari Bapak, Ibu sekalian. Program ini adalah program pertama di Kementerian ESDM sehingga perlu persiapan-persiapan yang lebih panjang, di samping keterbatasan waktu untuk pelaksanaannya. Kami mengharapkan masukan dan saran dari Bapak, Ibu Anggota Komisi VII DPR RI sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**



*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,*

Terima kasih Ibu Dirjen dan Pak Dirjen Gatrik yang telah menyampaikan pemaparannya.

Untuk selanjutnya kita menghemat waktu dan segera bisa dilakukan pendalaman dan disampaikan pertanyaan dan hal-hal yang dirasakan perlu oleh rekan-rekan Ibu, Bapak Anggota Komisi VII DPRI, kami persilakan untuk bisa dimulai dari Fraksi PDI Perjuangan. Baik, tadi Pak-Pak, ya, Pak Iwan nanti kalau enggak panjang nanti lanjut *aja* Bu Mercy, ya, silakan.

**F-P.GERINDRA (H. IWAN KURNIAWAN, S.H., M.Si.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh rekan-rekan Anggota Komisi VII,  
Yang saya hormati Ibu Dirjen dan Pak Dirjen bersama jajarannya.

Saya mulai dari program PJU-PJU tenaga surya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena program ini banyak sekali membantu masyarakat pesisir atau masyarakat perdesaan yang belum terjangkau aliran listrik PLN. Banyak masyarakat yang datang, bahkan meminta penambahan supaya program ini tetap bisa dilanjutkan atau ditambah.

Cuma ada satu masalahnya Bu Dirjen, PJUT, pembang, PJU tenaga surya ini kalau bisa diserahkan kepada ahlinya untuk *maintenance*-nya, Bu. Karena yang ahli dalam listrik itu adalah PLN, kalau diserahkan kepada Pemda, kadang-kadang Pemda menyampaikan bahwa pertama tidak ada anggarannya, kedua mereka bukan ahlinya. Saya kebetulan *ngerti* kalau soal listrik, jadi saran saya kalau diserahkan kepada PLN ini juga bisa lebih efektif untuk pengawasan dan *maintenance*-nya.

Apalagi kita tau bahwa, PJUTS ini-ini *kan* teknologi baru, jadi kalau Pemda mungkin belum ada spesial untuk merawatnya sehingga banyak yang sudah tidak berfungsi atau bohlamnya mati atau apa segala tapi tidak bisa dikerjakan secepatnya karena harus menunggu anggaran atau menunggu instruksi dari Pemda setempat, jadi itu *aja* Ibu Dirjen. Jadi kalau bisa ditambah dan untuk *maintenance*-nya kalau rusak diserahkan kepada PLN.

Terus yang untuk Pak Dirjen EBTKE, terima kasih AML-nya kami sudah terima, Pak. *Alhamdulillah* dari 7.000 yang saya ajukan bahkan sudah pernah kita sosialisasi di Kabupaten Gowa bersama stafnya Pak Dirjen, ada 4.000 lebih yang kami terima, selebihnya yang 3.000 ini masyarakat masih bertanya-tanya Pak, kok kami sudah dijanji enggak turun-turun, padahal mereka mendapatkan dokumen-dokumen itu contoh dapat dari lurah atau RT/RW bahwa mereka tidak punya AML dan lain sebagainya.



Kadang yang datang memeriksa itu menurut informasi, Pak, saya *ndak nuduh*, kadang mereka itu yang datang memeriksa itu kalau tempatnya itu agak jauh dari jalanan tapi ada sambungan listriknya mereka enggak disurvei lagi, jadi mungkin petugas-petugas survei itu kurang personilnya, Pak, ya, manusia biasa, ya, Pak, ya, dia lihat jauh-jauh dari jalanan enggak-enggak bisa kita masuk bilang *aja* enggak *komplit*.

Tapi intinya *gini*, Pak, selama yang menerima itu adalah warga negara Indonesia, program ini saya rasa bagus, Pak. Yang salah itu kalau yang menerima adalah warga negara Singapura atau Malaysia, *kan* ini *kan* untuk rakyat, Pak, AML ini *kan* untuk masyarakat tidak mampu. Jadi saya sarankan jangan terlalu banyak syaratnya, Pak, karena masyarakat desa kalau terlalu banyak syaratnya, ya, jangankan disuruh minta keterangan, menulis saja enggak bisa, Pak, kadang-kadang di kampung, jadi kalau bisa syaratnya jangan terlalu banyak sehingga program kita ini bisa dinikmati oleh masyarakat, khususnya di kampung saya, Pak, di pesisir. Itu *aja*, Pimpinan.

*Makasih.*

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Waalaiikumsalam,*

*Makasih.*

Lanjut Bu Mercy, setelah ini Pak Bambang Patijaya, silakan.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Baik, terima kasih Pak Pimpinan.

Yang saya hormati Bapak, Ibu Dirjen dan seluruh jajaran dari Kementerian Energi, ESDM.

Ini mesti tes *mic* ulang lagi *nih*. Baik ya. Terima kasih.

Pak Pimpinan,  
Pak Dirjen,  
Ibu Dirjen, dan  
Seluruh jajaran.

Saya langsung saja, yang pertama ini berkaitan dengan AML, untuk yang AML Pak Dirjen jujur saja kemarin itu kita cukup kecewa di lapangan, amat sangat kecewa. Karena situasi di lapangan kemarin dia agak sedikit spesifik,



ya, karena kita dalam fase Pemilu. Jadi ini sudah menyangkut kredibilitas kita juga ketika meng-*cover* data dan dikirim ke Kementerian ESDM cq Dirjen terkait.

Yang terjadi dari total yang saya kirim 6.000-an, 2.000-an saja mungkin yang bisa dilayani dan itu pun tidak dengan informasi yang tuntas. Karena bisa Bapak bayangkan sama-sama keluarga yang sudah kita sasar dan ambil datanya, satu tetangga dapat dan di sebelahnya bertepatan enggak dapat, ribut sudah ini, padahal yang dikirim ini *kan* semua melalui Kantor Pos.

Jadi harapan kami ke depan kalau sekiranya 7.000 itu hak kita harus *clear* 7.000 yang kita dapatkan. Harus disampaikan waktunya dengan tepat fase verifikasinya. Kalau ada verifikasi yang tidak sesuai, masih ada cukup waktu untuk kita melakukan penambahan data untuk memenuhi angka kuota kita yang 7.000. Pertanyaannya, sisa 5.000 yang tidak bisa saya miliki itu larinya ke mana, Pak? *Kan* sangat menyakitkan kalau di, apa, arahkan ke tempat lain, padahal kita di sini yang mati-matian membela, menambah anggaran, dan sebagainya, ini satu catatan.

Yang kedua, Pak, berkaitan dengan urusannya dengan persetujuan dari kepala-kepala desa ini. Maksudnya, apa urusannya ya kita tapi waktu itu kita mencoba memenuhi semua kriteria itu, yang terjadi, Pak, adalah kepala-kepala desa ini semua melihat kami, ya, sebagai Anggota DPR RI dengan bendera-bendera kami masing-masing. *Kan* menjadi apa, ya, program menjadi terdiskriminasi karena pilihan politik kami dengan kepala desa beda, karena kepala desa takutnya kepada Bupati/Walikota yang bukan satu bendera dengan kita.

Program ini program untuk masyarakat, Pak, jadi kalau program untuk masyarakat kenapa dalam implementasinya ini menjadi sangat rumit dan akhirnya kita terdiskriminasi hanya karena persoalan-persoalan persyaratan-persyaratan. Buat saya *requirement* yang tidak penting-penting mendingan itu dipotong, dihilangkan, supaya rakyat kalau mau dapat bantuan dapat *aja* enggak usah kita memperumit-rumit keadaan, karena ini toh *kan* untuk kepentingan masyarakat, ini uang rakyat *gitu loh*. Kalau apa namanya butuh verifikasi, program semua bantuan BLT yang dari pemerintah mereka enggak butuh tambahan lain-lain, cukup NIK yang ada di dalam apa data BNP2T DK apa, iya seperti itu DTKS, data DTKS, semua di *crosscheck* langsung NIK, semua di *crosscheck* langsung NIK karena dari NIK ketahuan mereka masyarakat miskin atau tidak. Kita menambah-nambah semua persyaratan-persyaratan yang buat kami menjadi sangat, apa Namanya, sangat tidak membantu.

Saya percaya Pak Dirjen pasti tahulah, tidak semua wilayah di satu Indonesia ini sama geografisnya. *Kayak* kami yang di Maluku, Pak, satu desa yang sudah berlistrik, Pak, mereka punya dusun itu *tuh* di pulau lain, Pak, hanya untuk mendapatkan izin kepala desa mereka harus dengan susah payah cari BBM, cari segala macam, hanya untuk bisa dapat tanda tangannya kepala



desa. Jadi ini mungkin bisa menjadi catatan kita di kemudian hari untuk persyaratan-persyaratan yang tidak terlalu penting.

Yang berikut berkaitan dengan program, apa Namanya, PJUTS. Pada akhirnya kemarin secara resmi saya menyurat resmi ke Menteri ESDM dan diterima resmi oleh Pak Dirjen, saya enggak tahu Pak Dirjennya sudah diganti atau belum ya? Belum *kan* masih Pak Dadang, ya? Atau *sorry* saya karena kelamaan, Ibu.

**DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Prof. Dr. Eng. ENIYA LISTIANI DEWI):**

Sudah diterima, Bu.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Sudah diterima, saya kirimnya ke Menteri dan saya berharap kemarin saya koordinasi dengan Pak Sekjen, *sorry*, dengan Pak Sekjen. Karena dua kali berkomunikasi dengan Pak Dirjen, Pak Dirjen memberi jaminan bahwa akan segera diselesaikan.

Dua persoalan yang berkaitan dengan 2 BUMN atau pihak ketiga Waskita Karya dan satu lagi ini, Bu, saya sangat berharap sekali mereka ini sebaiknya di *blacklist* resmi, ini saya sampaikan resmi di *blacklist*. Mereka kalau tidak mampu, tidak punya kapasitas jangan kasih kesempatan karena ini *udah* berkali-kali. Program seperti begini untuk daerah lain mungkin itu hanya sebagai *additional* penerangan, untuk kita di daerah timur menjadi primer, Bu.

Daerah-daerah yang tidak punya listrik hari ini dengan penerangan PJUTS, Ibu, anak-anak SD sampai SMP yang ada di pulau itu mereka malam hari di sepanjang jalan itu karena penerangan PJUTS belajar di jalan, Bu. Jadi kalau ini diperlambat, artinya kita sementara membuat masyarakat kita yang mestinya bisa mengakses penerangan secara baik, sulit untuk bisa hidup dan mendapatkan hak yang setara dengan masyarakat lain yang ada.

Oleh sebab itu, dalam surat resmi kemarin saya percaya ini agak tegas saya memberi catatan, ya, untuk dalam waktu yang tidak terlalu lama supaya masyarakat jangan di apa kita jangan dikejar-kejar sepertinya kita melakukan program yang menipu masyarakat. Mengapa? Dalam catatan saya dengan Pak Sekjen kemarin saya sampai bilang, Pak Sekjen, jangan sampai kejadian seperti sumur artesis yang ada di Maluku atau di daerah provinsi yang lain karena tidak selesai-selesai mereka lapor ke polisi, lapor ke DPRD naik di koran-koran. Saya sampai harus klarifikasi berulang-ulang berkaitan dengan program-program yang macet-macet seperti begini, Bu, padahal bukan kita yang salah, kita tidak main proyek kita tidak tau siapa pemenang tender, kita tidak *subkon*, tidak apa-apa, kita tidak ambil satu sen pun dari situ. Kita hanya



berharap program itu masuk ke masyarakat. Kalau semuanya sudah dikerjakan oleh pemerintah kenapa kejadiannya kayak begini.

Jadi ini menjadi catatan yang sangat-sangat keras buat khusus Kementerian ESDM cq Dirjen EBTKE untuk kali ini kalau bisa karena kali ini sudah ada Ibu jadi kami percaya dengan seorang Ibu mungkin hal-hal seperti begini bisa tuntas segera dikerjakan dan putus hubungan kontrak langsung dengan Waskita Karya dan yang satunya lagi itu yang main-main.

Saya kira itu dua catatan dari saya, Pak Ketua.

Terima kasih.

### **PERGANTIAN KETUA RAPAT (MENIT 41:55)**

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Ya, Ibu Mercy Barends percaya dengan seorang Ibu, ya, dan kita berharap tetap juga percaya dengan Bapak-Bapak. Ya dilanjutkan Pak Bambang Pati, dipersilakan yang terhormat.

**F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M):**

Baik, terima kasih Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat siang,  
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati Pimpinan, Anggota dan kawan-kawan Anggota Komisi VII, dan  
Dua Dirjen beserta jajarannya,  
Dirjen Gatrik dan Dirjen EBTKE.

Saya mungkin *gini* kalimat pembuka saya kepada dua Dirjen kita. Pak Dirjen dan Ibu Dirjen, ketika anda bekerja baik anda dapat pujian, tetapi ketika apa yang menjadi kewajiban, menjadi tugas anda lalu kemudian terdapat masalah-masalah, apa boleh buat anda harus mendapat kritikan sehingga apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi tuntutan daripada tugas itu dapat terlaksana, seperti itu.

Jadi saya ngomong begini untuk pembukaan, kalau saya julid itu harap maklum dan saya juga sampaikan bahwa, baik Pak Dirjen dan Ibu Dirjen ini memang situasi seperti ini memang tidak mengenakan, mungkin tidak dilaksanakan pada zaman-zaman anda tetapi anda harus pertanggungjawabkan itu, ada beberapa hal.



Pertama, kepada Dirjen EBTKE. Bu Dirjen, saya ketika Raker kemarin dengan Menteri saya *udah* ngomong keras, ya. Saya bilang pada saat itu agar Irjen periksa itu proyek, karena kenapa? Ini mekanismenya, ya. Jadi hati-hati kepada para PPK-nya, ya. Jadi kenapa? Karena ini sudah terjadi penyalahan, ya.

Saya enggak tahu ini masih dalam konteks keperdataan, ya, kontrak-kontrak keperdataan, tetapi ingat kadang-kadang kalau ini ke sampai kepada aparat hukum kadang-kadang terjadi pidana juga, hati-hati, ya.

Nah yang pertama yang saya tanggapi, kenapa semua Anggota Komisi VII ini rata-rata marah terhadap terkait persoalan baik PJUTS maupun terkait dengan AML ataupun program yang lainnya, karena ini kami menganggap program aspirasi. Ketika kami kembali ke Dapil kami, ketika kami kembali kepada konstituen ini sebetulnya oleh-oleh kami dan kami pun berhutang janji dengan masyarakat yang di bawah.

Yang pertama terkait dengan PJUTS. Saya ini kalau kembali ke Bangka Belitung kalau ketemu Kades, kalau ketemu Kadus, kalau ketemu lurah, ya, kita ini ditanya apa sih oleh-oleh dari pusat, ya, kita bilang yang seperti ini. Kalau Bu Mercy seperti disampaikan oleh beliau itu harapannya lebih daripada persoalan oleh-oleh, tetapi persoalan bagaimana kebutuhan masyarakat. Misalkan daerah-daerah yang 3T, ya, penerangan di malam hari itu menjadi masalah, ya.

Nah saya ini juga sama mendapat kadang-kadang bukan lagi apa namanya sindiran, tapi sudah kadang-kadang enggak enaklah, ya. Ketika kami periode kemarin reses kita itu malah jadi bahan olok-olokan kadang-kadang, ya. "Pak, itu lampunya mana sudah kalau bicara yang lama, ya, baru dipasang sudah mati," satu, yang kedua, "Pak, itu *udah* diambil titiknya, *udah* digali ya, tetapi sekarang saya terpaksa sampaikan ke masyarakat untuk ditimbun ulang karena sudah ada anak jatuh ke dalam itu," *kan* enggak enak seperti itu.

Ini fakta *loh*, ini ngomong Kades, jadi ada beberapa titik yang sudah digali itu suruh tutup lagi, karena ada ana nak main jatuh ke dalam itu, bayangkan aja kalau ketimbun. Itu lubangunya *kan* enggak besar itu, ada *aja* yang menjadi masalah, ya.

Nah saya sampaikan bahwa ini dari data yang disampaikan ini baik PJU Indo 1, Indo 2, Indo 3, Indo 4, Indo 5, tadi Mbak Ratna tanya ke saya ini apa *sih* yang tender apa *sih* yang apa e-katalog, nah nanti di *e-purchasing*, ya e-katalog juga, ya, nanti dijelaskan, karena kenapa? Hati-hati juga yang kepada e-katalog malah justru ini, ya, yang paling besar, paling besar tidak selesai, hati-hati, ini enggak tender ini, penunjukan ini, ya, e-katalog hati-hati. Karena orang-orang yang dipilih itu *kan* berdasarkan subjektivitas tim, bukan objektivitas, ya, subjektivitas tim, kenapa begini, kenapa begini, maka ditunjuklah ini sebagai pemenangnya, hati-hati.

Nah makanya saya bilang Ibu-Ibu Dirjen, jangan mau ketarik-tarik dengan persoalan-persoalan. Ibu *kan* baru datang nih, tugas Ibu datang ke situ tolong benahi, sehingga yang namanya EBTKE ini betul-betul dapat bergerak kencang. Kami Komisi VII ini lagi pembahasan RUU EBTE, EBT, ya energi baru, terbarukan. Nah Dirjen EBTKE ini *kan* salah satu bagaimana penterjemahan itu, pelaksanaan itu, jangan sampai kemudian ketarik-tarik, ya, kami mohon ini dapat diselesaikan.

Nah jadi kontrak kalau memang-memang sudah lewat waktu putus dan yang terutama itu jaminannya cairkan untuk negara, kontrakturnya *blacklist*. Jika memang ada pelanggaran-pelanggaran, ya, itu hati-hati PPK juga dicermati jangan sampai kemudian mencairkan uang melebihi situasi yang ada di lapangan, hati-hati. Ini semuanya saya-saya sampaikan karena uangnya besar dan ini menjadi sorotan masyarakat. Karena kenapa? Setiap daerah komplain protes, ya, seperti itu, Bu, ya, hati-hati.

Nah kemudian kami juga mencermati tentang banyaknya titik-titik yang dipasang 2022 dan 2023 yang mati. Nah ini kayak *gimana*, tadi Pak Andi sudah menyampaikan ini kayak *gimana*, karena yang ada *tuh* pingpong, saya juga jadi sampai enggak enak, ya. Ini *gimana* baru dipasang dua minggu mati, ada yang baru dipasang pagi sorenya *udah* enggak nyala, eh, bukan sorenya, besoknya *udah* enggak nyala lagi, ada itu seperti itu. Jadi kita jadi bahan olok-olokkan juga, kemudian bagaimana mengantisipasi persoalan-persoalan akibat vandalisme ini *kan* juga harus diatasi. Jadi kita bukan hanya bersifat *project* tapi juga bagaimana kebermanfaatan, ya.

Nah kemudian bagaimana untuk kelanjutan PJUTS ini, apakah di tahun 2024 dan seterusnya akan tetap terus dilaksanakan proyek-proyek baru atau hanya melaksanakan *carryover* proyek yang lama berdasarkan paparan yang di sini dalam strategi penyelesaian program PJUTS. Nah itu terkait dengan kepada Dirjen EBTKE.

Lalu kepada Pak Dirjen Gatrik. Pak, program ini kalau menurut penuluruhan saya yang masalah itu di validasi, satu validasi. Kemudian yang kedua ketika proses pendistribusian, minta tanda tangannya susah setengah mati. Memang inilah yang disampaikan Ibu Mercy ini, jika program untuk masyarakat dipolitisasi, ya.

Saya mendapati ada satu kabupaten tertentu di pulau Bangka itu lurahnya juga menolak tanda tangan, karena bupatinya beda bendera dengan saya. Nah ini *kan* repot, kalau persoalan kebermanfaat untuk masyarakat semuanya dipolitisasi. Mudah-mudahan ini menjadi satu berita juga bagi media nasional untuk menyampaikan hentikan politisasi untuk program masyarakat, *kan* seperti itu.

Nah jadi PLN ini juga sudah saya kritik, saya sampaikan kepada direksi PLN, ini yang harus ditingkatkan itu adalah bagaimana persoalan koordinasi antara Gatrik, tim Bapak, dengan PLN sebagai yang memvalidasi. Ada dua



program, Pak, yang saya catat, pertama AML dan yang kedua BPBL. Ini penugasan kepada PLN untuk melakukan validasi ke bawah itu tanpa diberikan informasi, jadi yang ada *tuh* PLN mengklaim itu programnya dia, serius ini. PLN klaim yang di bawah itu program dia, padahal nama semua itu dari kita.

Nah kasus yang lain seperti misalkan pada BPBL, ya. Kalau tahun 2023 kemarin enggak ada koordinasi, sekarang sudah baguslah sudah ada koordinasi. Nah harapan kami harapan kami juga sama, PLN nanti yang memvalidasi ini tolong, Pak, dikasih informasi. Saya sudah sampaikan kepada direksi PLN kepada Pak Adi dan sebagainya, tolong, Pak, ini yang namanya program aspirasi Anggota DPR disampaikan saja, kami tidak pernah meminta apapun, kami ini *kan* membantu dalam proses validasi, anggarannya kami-kami dukung sehingga, ya, kami ini *kan* cuma berharap persoalan elektoral saja, itu saja, *biar* kami ini punya-punya program yang kami bawa ke masyarakat.

Jadi kita tidak meminta misalkan, oh, nanti minta proyek lah ini, enggak, kita cuma minta persoalan-persoalan apa yang memang menjadi aspirasi kami, sampai kepada masyarakat dan masyarakat tahu bahwa itu programnya program kami sebagai anggota Komisi VII, ya. Jadi validasi dari PLN ini tolong nanti untuk program-program selanjutnya ini tolong, Pak, ditingkatkan koordinasi, Pak. Jadi tidak ada lagi saling klaim ini program siapa, program siapa.

Kemudian, ya, saya pikir demikianlah, ya, persoalan koordinasi sehingga dengan demikian jika ada program-program seperti ini yang agak mepet-mepet waktunya *injury time* kita tidak terlalu berisik, jadi apa kebermanfaatannya dan tidak ada politisasi sehingga masyarakat betul-betul mendapatkan manfaat terhadap program tersebut. *Aamiin*.

Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat siang,  
Salam sejahtera untuk semua.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,*

Pak Bambang Pati, dilanjutkan Partai Gerindra dulu.

**F-GOLKAR (DYAH RORO ESTI WIDYA PUTRI, B.A., M.Sc.):**

Izin, Pimpinan, tadi PDI *udah*.



**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oh, sudah ya, dipersilakan Ibu Roro.

**F-GOLKAR (DYAH RORO ESTI WIDYA PUTRI, B.A., M.Sc.):**

Terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua.*

Yang saya hormati Bapak Ketua,  
Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi yang saya banggakan, dan juga di  
sini  
Mitra kerja kami Ibu Dirjen dan juga Pak Dirjen Gatrik,

Ibu Dirjen EBTKE, selamat atas amanah barunya semoga dengan  
kehadiran Ibu bisa melakukan terobosan-terobosan yang kami nantikan sudah  
bertahun-tahun ini terkhusus berkaitan mengenai program PJUTS, ya, Bu.

Jadi yang pertama saya lebih ingin menyoroti apa yang telah dikeluh  
kesahkan oleh rekan saya Bu Mercy itu betul sekali, bahwa kita harus berupaya  
untuk merubah perizinan-perizinan yang berjalan di lapangan berkaitan  
mengenai eksekusi daripada program PJUTS ini.

Karena kalau semuanya di-di kemudian kita bebankan atau kita  
membutuhkan sebuah acc dari seorang Bupati dan jajarannya yang belum  
tentu secara politis itu mungkin mereka mempunyai prefensi politik tersendiri  
*gitu*, ya, ini hal-hal yang menurut saya mitra kerja kami harus paham dan harus  
sensitif terhadap hal-hal seperti ini. Karena ketika kita ingin berkerja sama,  
otomatis kami mempunyai tekad dan niat baik untuk hadir di tengah-tengah  
masyarakat.

Nah kebetulan permasalahan ini permasalahan yang bukan hanya  
dialami di Dapil Gresik dan Lamongan, tetapi juga dialami di wilayah-wilayah  
lainnya bahkan tadi sudah disampaikan di daerah Bangka Belitung, di Maluku,  
dan lain sebagainya. Jadi tolong dari Kementerian lakukanlah sebuah  
terobosan, agar perizinannya itu tidak serumit ini sehingga pelaksanaan di  
lapangannya bisa lebih maksimal, itu yang pertama.

Lalu kemudian yang kedua, untuk implementasi dan realisasi program  
PJUTS terkhusus di wilayah Gresik dan Lamongan dilakukannya melalui dua  
tahap. Jadi di tahap pertama pada intinya mohon maaf, pada intinya kami  
mendapatkan jatah 500 titik. Di tahap pertama dilakukannya untuk 350 titik dan  
ini melalui perusahaan PT Waskita, ya, dan itu kurang lebih berjalan dengan



lancar namun terkendala di 30 titik, alokasi 30 titik yang sudah saya niatkan dan saya tegaskan agar alokasinya bisa untuk di Pulau Bawean dan di situ terkendala karena ada permasalahan tidak ada anggaran dan lain sebagainya.

Di fase kedua itu dilakukannya untuk 150 titik dan kebetulan dikerjakan oleh kontraktor yang berbeda yaitu adalah PT Inti. Nah ini menjadi tanda tanya untuk saya, karena yang saya temukan dan saya pelajari di lapangan adalah kinerjanya jauh dibandingkan PT Waskita yang tadi saya sudah sampaikan. Ini saya enggak punya kepentingan apa-apa, ya, Ibu, ya. Jadi saya enggak ada enggak ada ikut campur di hal ini, saya hanya melihat yang mana yang menurut saya jauh lebih komunikatif, jauh lebih bisa mampu mengeksekusikan program dengan baik.

Nah ini menjadi tanda tanya buat saya, kenapa? Karena kembali lagi ke *slide* nomor 5 di poin nomor 5 mengenai pembangunan PJUTS wilayah Indonesia 5 dan di situ kita melihat bahwa jumlah unitnya fantastis sekali, 10.468 dibandingkan dengan wilayah mohon maaf, dibandingkan dengan nomenkelatur yang lainnya dan nilai kontraknya juga sangat amat besar.

Nah saya mohon sekali dilakukannya sebuah pengecekan secara rinci *gitu*, ya dan saya meyakini bahwa ini tidak terjadi di hanya satu lokasi saja. Saya rasa banyak sekali wilayah lainnya yang juga merasakan hal yang sama, karena saya harap bahwa komunikasi di kemudian hari ke depannya bisa lebih baik, realisasi di lapangan juga bisa lebih baik, metode dari segi pengecoran dan lain sebagainya pengoboran, mohon maaf, itu juga bisa lebih maksimal dan yang berikutnya adalah kualitas yang digunakan *gitu*, ya, PJUTS yang digunakan itu juga bisa baik agar tidak terkendala dengan matinya lampu dan lain sebagainya setelah apa namanya PJUTS tersebut dipasang.

Nah ini menjadi sangat memprihatinkan, Ibu, apa-apalagi sekarang ketika kita berbicara mengenai Pulau Bawean, ya, Pulau Bawean ini *kan* dia bagian dari Kabupaten Gresik, memang dia Pulau tersendiri dan dibutuhkannya 3 jam naik perahu untuk sampai di lokasi tersebut. Dan belakangan ini ini juga saya ingin meng-*hatur*-kan bela sungkawa, turut berduka karena beberapa saat yang lalu dialami sebuah gempa yang cukup drastis mempengaruhi masyarakat bukan hanya yang tinggal di Pulau Bawean dan itu puluhan ribu, ya, yang terkena dampaknya tetapi juga di wilayah Lamongan, di Tuban, hingga di Surabaya semua merasakan hingga Bojonegoro juga sama *gitu*, ya merasakan hal yang sama.

Nah maka ini menjadi PR kita ke depannya Ibu, agar wilayah-wilayah yang terkena bencana alam seperti ini bisa mendapatkan perhatian, terkhusus mengenai pembangunan infrastruktur yang harus menjadi prioritas. Saya mohon sekali agar ada sebuah terobosan dan tolong hal-hal yang sudah kami sampaikan di forum ini bisa menjadi masukan yang harus betul-betul dipelajari terkhusus tadi perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam eksekusi program PJUTS.



Yang kedua berkaitan mengenai AML, ya. Sebetulnya saya ingin apresiasi terlebih dahulu *nih*, Pak, karena saya melihat realisasinya cukup tinggi. Dari 7.000 yang saya minta 6.129 itu terealisasikan dengan baik. Nah tapi apapun itu masih ada buah *gap* di situ, ya, jadi apapun masih apa tidak sesuai target namun tetap harus kita apresiasi karena dari segi presentase itu juga sudah cukup baik.

Namun dalam proses realisasi dan eksekusi program AML ini saya berharap dan saya mohon kerja samanya dengan tim kami yang ada di lapangan, libatkanlah tim kami untuk ikut bekerja, ikut memonitor, ikut memantau realisasi dan juga pendistribusian daripada program AML ini agar tepat sasaran.

Ini juga kembali lagi bentuk kerja sama Komisi VII DPR RI dengan mitra kerja, yakni Kementerian ESDM yang terlibat di sini juga ada PT PLN, ada juga PT Pos yang melakukan pengiriman barangnya, mohon ke depannya agar tidak dihambat ketika ada Anggota tim kita ingin berkontribusi, ingin terlibat di dalam proses pendistribusian.

Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,*

Ibu Roro, masih dari Golkar ini, nampaknya Golkar agak mendominasi, ya dipersilakan Pak Lamhot.

**F-GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):**

Mendominasi maksudnya *gimana*, Pak Ketua?

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Maksudnya di Dapil 3 kursi.

**F-GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):**

Oh, kursi.

Baik, terima kasih Pimpinan dan teman-teman Anggota, Bu Dirjen, Pak Dirjen.

Saya sedikit *aja*, pertama PJUTS. Ini banyak yang mati *loh* Bu Dirjen, ya. Bahkan yang 2.000 pemasangan 2022 banyak yang mati itu sampai hari ini



belum menyala *gitu*, ya. Jadi sempat terpasang dengan baik, terus kemudian setelah dipakai mati *udah* setahun lebih *gitu*, ya. Demikian juga yang 2023, yang baru, bahkan ada yang hanya 1 bulan terpakai terus kemudian mati *gitu*, ya. Nah masyarakat juga bingung mau ke mana mereka.

Nah pertanyaan saya adalah saya kira dari ESDM tidak bisa hanya melepas ke kontraktornya, khusus PJUTS yang mati-mati ini. Nah harus ada satu PIC tertentu yang bisa ditunjuk yang bisa kami koordinasikan, karena masyarakat ke kami, kami juga bingung mau ke mana, kami *kan nggak* kenal kontraktornya Bu, *kan* begitu. Artinya kalau kita kontraktornya *aja* yang kita harapkan untuk memperbaiki semua itu, ya, kami *nggak* kenal mereka, kami *nggak* tahu siapa mereka.

Nah oleh karena itu, kami minta supaya ada penanganan khusus khususnya PJUTS yang mati. Kami titik-titiknya nanti akan kami serahkan daftarnya tapi ke mana kami harus melaporkan ini nanti tolong diberikan solusi.

Mengenai AML, Pak Dirjen, memang kemarin itu jujur kita katakan bahwa waktunya sangat-sangat-sangat mepet, ya, saya di tempat kami sendiri juga banyak yang setelah apa setelah-setelah Pemilu itu baru bisa barangnya baru tiba oleh Kantor Pos, ya. Nah orang di tengah-tengah sibuk rekapitulasi Kantor Pos nelepon, "Pak barangnya baru datang", *gitu*, ya, kita bingung *gitu*, untungnya Pak Dirjen waktu itu saya lolos *gitu*, ya. Saya *nggak* kebayang kalau pada saat itu saya agak suaranya tidak bagus, ya, mungkin ini akan jadi rusak suasananya *gitu*. Ya, tiga kursi, Pak Tifatul.

Nah maksud saya adalah sudah mepet terus persyaratannya yang sangat-sangat luar biasa. Sudah persyaratannya sangat sulit, pendistribusiannya juga ya sangat *crowded*, terus kemudian juga terlambat, dan lain sebagainya. Nah menurut kami, ya, persyaratan itu ke depan mungkin akan kita evaluasi, kita bicarakan, Pak Dirjen. Artinya persyaratan itu kalau kemarin *kan* hanya, ya, mungkin memang itu otoritas ESDM *lah* membuat persyaratan itu, tapi *mbok* mungkin bisa kita diskusikan *lah*, ya. Yang *ngerti* lapangan ini *kan* kita-kita, Pak-Pak Dirjen. Artinya walaupun kami diminta masukan dalam konteks persyaratan ini barangkali kami akan bisa memberikan masukan tanpa harus melanggar peraturan yang ada, tapi izinkan kami nantinya kalau kemudian program ini masih ada dan masih lanjut, izinkan kami nanti untuk memberikan masukan terhadap persyaratan-persyaratan yang dilakukan supaya kami juga bisa mensiasati.

Tadi Bu Mercy dan teman-teman yang lain sudah mengatakan ini di bawah ini beragam, beragam karakter, Pak, ada yang kepala desanya tidak bisa sejalan, ada bupatinya dan lain sebagainya, nah untuk mensiasati ini mungkin barangkali ke depan kami juga punya masukan. Nah dalam rangka itu saya mengusulkan kalau ini nanti mau dilanjutkan kami dimintakan masukan *lah* apa cara atau syarat. Itu *aja*, Pimpinan.

Terima kasih.



**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Ya, Pak Lamhot.

Jadi baru datang setelah rekapitulasi, justru karena itu jangan-jangan jadi tiga kursi itu, Pak Lamhot. Ya, dilanjutkan dari Partai Gerindra.

**F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):**

Izin, Pimpinan. Oh Gerindra, Golkar satu lagi boleh? Oh *gitu*, lanjut-lanjut-lanjut.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Nah nanti putaran selanjutnya. Gerindra, oh, tidak ada, dilanjutkan dari Partai Nasdem, selanjutnya Pak Edi dipersilakan pimpin kembali.

**PERGANTIAN KETUA RAPAT (MENIT 01:05:17)**

**F-NASDEM (ARKANATA AKRAM, S.T., B.E. (Hons) MEng.Sc.):**

Ya, terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam sejahtera untuk kita semua.*

Yang terhormat Pimpinan serta Anggota Komisi VII DPR RI,  
Yang terhormat Dirjen EBTKE serta Dirjen Gatrik beserta jajarannya.

Izin Pimpinan dan rekan-rekan, tadi, dari tadi kami juga sudah menyuarkan terkait dengan program-program yang langsung ke masyarakat untuk dari EBTKE dan Gatrik. Dan terkhususnya saya ingin memberi masukan kepada dua-duanya sekaligus juga kepada Ibu Dirjen EBTKE karena juga masih baru dan ini sebenarnya sudah berkali-kali saya suarkan di DPR RI, mulai dari tahun 2019 sampai tahun ini, ini tahun kelima saya berada di Komisi VII dan di DPR RI.

Saya selalu menyampaikan bahwa, kami di daerah 3T yaitu, daerah Kalimantan Utara, daerah Maluku, kemudian di sini rekan saya ada Pak Rico dari Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua, yang namanya PJUTS itu adalah program unggulan kami. Karena di sini adalah daerah-daerah yang infrastrukturnya sulit untuk dimasuki dan sulit untuk dibangun yang kami juga cukup pahlam, ya, medannya cukup sulit untuk dibangun jaringan listrik kabel.



Nah jujur saya juga sudah cukup banyak menyuarakan mengenai kebutuhan ini, oleh karena itulah pada hari ini saya memberikan masukan. Karena setelah melihat ke belakang masalahnya ini sebenarnya ini bukan secara administrasi, Ibu Dirjen. Karena jujur terkhususnya untuk di Kalimantan Utara sendiri yang sampai tahun ini juga selalu ada telat, telatnya minimal 1 tahun pembangunan untuk PJUTS itu dan selalu sudah digali duluan sampai jadi kolam di depan rumah masyarakat itu. Karena sudah jadi lubang, jadi kolam, hujan terus, mungkin tinggal diisi ikan saja sudah bisa bikin UMKM ikan sendiri mereka.

Jadi yang belum bisa masuk itu adalah PJUTS itu sendiri. Di sini kami melihat ada beberapa masukan yang sangat penting untuk Dirjen EBTKE, ada dua menurut saya yang penting. Yang pertama yaitu untuk daerah-daerah 3T mungkin bisa memilih kontraktor yang memiliki pemahaman atau pengalaman mengenai infrastruktur yang ada di daerah 3T itu. Artinya, kontraktor-kontraktor ini harus memiliki persyaratan tertentu yang bisa memahami dan bisa mempercepat untuk pembangunan PJUTS yang ada di daerah 3T, itu yang pertama.

Kemudian pilihan yang kedua yang menjadi masukan saya adalah yaitu, berikan keringanan pada kontraktor-kontraktor yang sudah ada. Karena apa? Mereka sudah menggali kemudian mereka juga, tapi barang-barangnya juga belum masuk tertunda dan ini *kan* menjadi sebuah ini keteledoran yang pada akhirnya itu nanti kontraknya malah habis, diberikan kesempatan pertama dan kedua kontraknya yang habis.

Untuk daerah 3T, Ibu Dirjen, ini yang kena bukan pengusahanya, yang lebih kena masyarakatnya. Kalau di Jawa kita berbicara, kalau di Sumatera kita berbicara kita memberikan satu titik PJUTS yang kita terangi mungkin bisa sampai 15 sampai 20 rumah, tapi di daerah 3T daerah Kalimantan Utara satu titik PJUTS kita bisa menerangi satu desa, jujur Bu satu Desa. Karena titik-titik yang kami letakkan itu adalah titik-titik khusus yang memang untuk kebutuhan masyarakat sendiri yaitu, dekat sekolah, dekat daerah yang sulit untuk motor lewati, daerah-daerah yang dekat dengan rumah sakit, jadi daerah-daerah yang sangat penting.

Kemudian yang menjadi alasan lagi, kenapa ini sangat penting catatan yang saya berikan pada hari ini, masukan ini, karena sampai hari ini daerah-daerah 3T ini tidak pernah memiliki masalah dalam penyampaian data. Tadi Ibu Mercy sudah menyampaikan betapa sulitnya untuk di daerah Bu Mercy mengenai pengumpulan data itu sendiri tetapi tetap bisa memasukkan data itu ke Kementerian ESDM dan itu kami lakukan untuk mempermudah kinerja kedirjenan EBTKE sendiri. Dan terkhususnya untuk Kalimantan Utara ini, Bu, mungkin Ibu baru di sini tapi saya sampaikan saja tidak apa-apa.



Selama 4 tahun berturut-turut kami tidak pernah telat menyampaikan data untuk PJUTS dan selama 4 tahun berturut-turut saya ber-*deal* dengan orang-orang yang bukan dari bendera saya sendiri, mulai dari Bupati sampai Gubernur semua orang yang saya kontak itu bukan dari partai saya, bukan dari bendera saya. Artinya apa, inilah sangat pentingnya PJUTS itu yang ada di daerah 3T itu, jadi itu yang masukan saya untuk PJUTS.

Kemudian pada Pak Dirjen Gatrik, untuk AML ini saya kira, ya, tentu saja masyarakat Kalimantan Utara sangat berterima kasih dan tentu saja sangat ditunggu untuk kelengkapannya, tetapi sekali lagi saya sampaikan, Pak, Pak Dirjen, bahwa Kalimantan Utara ini mungkin yang lebih utamanya bukan AML-nya dulu tetapi jaringan listriknya itu sendiri dulu. Dan ini di tahun 2024 ini saya lihat sudah mulai masuk TKA dari RRC di daerah Bulungan, daerah Bulungan sendiri yang kekurangan listrik, jaringan listrik dan kekurangan penerangan jalan.

Dan saya kira ini saya berani bilang untuk di Kalimantan Utara ini mungkin TKA-nya ini tidak hanya akan membawa AML sendiri, Pak, tapi mungkin akan bawa *genset* sendiri supaya bisa memasak nasi sendiri, karena listriknya saja belum bisa masuk padahal ini adalah penunjang utama.

Saya sangat paham bahwa, untuk masalah pemasangan jaringan listrik ini butuh koordinasi antara pemerintah daerah, karena tanggung jawabnya lebih banyak di sana, dan PLN. Akan tetapi sangat dibutuhkan sekali juga *support* dari Kementerian ESDM, minimal Pak Dirjen bisa menyampaikan juga ke saya bahwa sedang ada dibangun jaringan listrik di SP 9 di Kabupaten Bulungan.

Saya belum tahu, Pak, saya waktu datang kunjung masyarakat ke sana saya kaget melihat ini ada dipasang listrik ternyata baru dipasangnya November tahun lalu dan saya datang ke sana kemarin bulan Februari, ya, dan ini *kan* sangat lucu, malah PLN duluan yang lebih tahu, Pak. Harusnya kami yang anggota di sini diberitahu juga progresnya dan ini *kan* menjadi catatan bukti bahwa untuk daerah yang menjadi, yang sudah mulai beroperasi untuk daerah **Kipinya (menit 01:12:07)** yang kami sendiri juga tidak pernah diberitahu oleh komisi, oleh Kementerian ESDM berjalannya bagaimana progresnya segala macam itu perlu ada informasi yang sangat lengkap dari Kementerian ESDM terutama dari Dirjen ketenagalistrikan.

Mungkin itu saja Pimpinan yang menjadi masukan saya, kurang lebihnya mohon maaf.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*



**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Ya, silakan Pak Rico.

**F-NASDEM (RICO SIA):**

Izin Pimpinan nambah *dikit*.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Ya, silakan, Pak.

**F-NASDEM (RICO SIA):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera untuk kita semua.

Langsung mungkin ke Pak Dirjen Gatrik, saya pikir sama *lah*, Pak, dengan yang lain-lain, teman-teman rekan-rekan yang lain jadi mungkin langsung ke ibu Dirjen EBTKE.

Ibu Dirjen izin, hanya menambahkan saja dari teman-teman yang lain keluhan kurang lebihnya sama. Yang terakhir tambahan saya adalah kemarin sementara kita lagi sibuk-sibuk, ya, mulai-mulai pemanasan dan lain sebagainya di sana tanggal 12 Februari unit PJUTS-nya masuk ke dapil saya Papua Barat. Lalu karena ada libur A, B, C, D, E *lah* segala macam terus masuk ke pemilihan habis itu dengan euforia-euforia perhitungan segala macam, akhirnya mungkin semua sibuk, ya, jadi akhirnya agak terlambat. Tiba-tiba di setelah selesai itu mereka sibuk pasang-pasang, *kan* kolam sudah selesai, eh, kolam lagi, apa namanya lubang-lubang semuanya *udah* selesai tapi *udah* jadi kolam juga karena selesainya *udah* di bulan Desember, barang enggak datang-datang.

Datang bulan Februari orang sibuk, waktu pasang tiba-tiba disuruh stop. Enggak ada lagi orang yang mau bayar, yang gali gimana, masyarakat yang gali masyarakat Papua rambut keriting kulit ribut lagi semuanya ini mending merdeka katanya, kalau dikerjain terus kayak begini katanya. Uang cuma 700.000 uang cuma berapa *gitu* suruh kerja terus kemudian disuruh stop enggak ada yang mau bayar. Terus kita punya uang makan mau kasih makan anak dan istri gimana katanya, kalau hanya dikerjain sama Pemerintah Republik Indonesia katanya, itu yang terus digaungkan.



Nah kemarin saya agak terlambat tadi karena mereka WA-WA saya terus tadi akhirnya saya masuk lagi ke sini. Nah Ibu yang ingin saya tanyakan, apakah kontrak dengan penyedia barang dan jasa tadi itu punya masa pemeliharaan? Karena waktu berakhir tanggal 20 Maret mereka semua distop dan tidak ada yang mau dibayar lagi, ributlah di dapil saya. Pertanyaannya tadi, apakah ada masa pemeliharaan? Kalau masih ada pemeliharaan tentunya mereka masih boleh *dong* dikerja dan dibayar, masa pemeliharaan ini *kan* masih ada.

Nah tolong kesampaikan kepada penyediannya yang menang tendernya ini diselesaikan *dong*. Kalau enggak juga jadi temuan kerugian negara ada barang beli, taruh di sana *gak* terpasang, siapa yang salah? Apakah orang yang tadi kita upayakan mereka kerja tadi yang rambutnya keriting, kulitnya hitam ini kemudian dikorbankan lagi? Yang sudah menggali, yang sudah selesai dari bulan Desember, tapi karena barang yang telat jadi kolam, gali lagi ulang dengan bayaran yang sama untuk mereka masukkan tiangnya dan kontraknya akan dibayar apabila sudah nyala, kalau lampunya mati enggak dibayar juga katanya, terus *gimana dong* mereka ini yang cuma dapat uang sejuta dalam masa kontrak 1 tahun.

Nah coba kita pikirkan itu Ibu mungkin saya sampaikan keluhan dari masyarakat terkecil tadi, mudah-mudahan ada solusi dari Dirjen EBTKE kepada kontraktornya yang tentunya menurut saya ini semua masih dalam masa pemeliharaan. Kenapa enggak suruh mereka pasang *aja sih* terus dibayar cuma kerjanya kontraknya cuma berapa, coba Ibu tanya minta Subkon yang mereka berikan kepada masyarakat-masyarakat di daerah itu, yang di wilayah yang kalau mereka kerja pun harus *nyebrang* pulau, harus *ngangkat* pakai perahu. Contoh Raja Ampat, *gimana* bisa *nyampai* ke sana? Apa pakai truk? Enggak *kan*, pasti pakai perahu lagi *kan*, **jadi bisa sampai** di masing-masing wilayahnya.

Mungkin itu saja Ibu, mohon menjadi perhatian kepada kontraktornya agar tidak hanya diputuskan begitu saja dan orang yang sudah kerja itu dibiarkan terlantar begitu saja.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera untuk kita semua.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,*

Lanjut Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Bu Ratna, setelah ini Pak Hendrik, silakan.



**F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang kami hormati Ketua, Pimpinan dan seluruh sahabat-sahabat Komisi VII, Yang kami banggakan Ibu Dirjen, selamat, ya, Bu, dan Pak Dirjen beserta segenap jajarannya yang hadir.

Terima kasih atas pemaparannya Ibu dan Bapak, mungkin saya langsung *aja*, ya, tadi banyak banget memang permasalahan yang sudah disampaikan oleh teman-teman di sini, saya ke Dirjen EBTKE dulu.

Yang halaman 5, Bu, tadi memang sedikit di-*spill* sama Pak Bambang Patijaya kita pengin tahu, ya, perbedaan proses pemberian kontrak antara e-*purchasing* dengan tender itu seperti apa, *gitu*. Sebab kami lihat di situ *kok* ada dua perusahaan yang mendapatkan pekerjaan dengan kontrak, jenis kontrak yang berbeda. Nah itu mungkin bisa nanti disampaikan, soalnya *kan* setelah kita lihat di halaman 8 itu ada laporannya bahwa, yang wanprestasi maksudnya tidak bisa menyelesaikan kontrak dengan baik ini malah justru perusahaan-perusahaan plat merah *gitu*, ya okelah yang satu BUMN tapi yang satunya lagi *kan* anak perusahaannya BUMN *gitu kan*.

Saya paham bahwa, di antara lintas sektoral ini membutuhkan kerja sama, sinergi, segala macam, supaya keuangan pemerintah juga terbantu begitu, ya, *cash flow*-nya aman. *Cuman kan* kalau misalnya plat merahnya model seperti ini apakah enggak tambah malu-maluin negara *gitu*, ya, satu.

Yang berikutnya, kita harus memberikan porsi yang *fair dong*. Kalau misalnya memang terbukti setelah dievaluasi perusahaan swasta ini bisa menyelesaikan tugas mereka dengan baik *kok gitu*. Sebut saja di sini kita ada yang PT apa ini KSO PT Gerbang Multindo Nusantara dan PT Surya Utama Putra, saya enggak kenal *loh* Bapak, Ibu, yang punya siapa *base, home base*-nya di mana saya enggak tahu juga *gitu, cuman kan* setelah kita melihat laporannya Ibu Dirjen mereka ini tertib *gitu loh*, mereka bisa menyelesaikan pekerjaan minimal waktunya itu sesuai.

Kita enggak *ngerti*, ya, nanti kualitas barangnya bagaimana sesuai atau enggak kita enggak *ngerti, cuman kan* paling tidak target dari waktu ini sudah terpenuhi. *Lah* kalau misalnya dia sudah bisa bekerja dengan baik, berarti sudah waktunya pemerintah dalam khususnya Kementerian ESDM lebih khusus lagi Dirjen EBTKE harus sudah membuka diri dengan perusahaan-perusahaan swasta yang mampu berkompetisi memenuhi persyaratan dan terbukti bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik.

Yang berikutnya, Bu, tadi disampaikan juga, ya, di halaman 8 bahwa sudah ada mitigasi begitu untuk menyelesaikan pekerjaan yang perusahaan ini



sudah di-*blacklist* tapi tetap harus pasang *nih, gitu kan*. Salah satunya adalah mengusulkan realokasi anggaran sesuai dengan ketentuan perundangan.

Kami minta progress, Bu, itu targetnya selesai kapan dan apakah sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan maupun Bappenas. Soalnya kita harus belajar dari pengalaman, biasanya ini gula-gula juga *gitu loh*. Izin lapor saya yang di Kabupaten Bojonegoro itu masih kurang 65 titik, Pimpinan, separuh dari yang tahap satu dan tahap dua yang belum terpasang, itu saya di Pulau Jawa. Saya bisa membayangkan *nih gimana* perasaan sahabat-sahabat kami yang ada di luar pulau Jawa bahkan di daerah-daerah 3T tadi yang katanya lobang menjadi kolam ini *kan, ya, nyesek juga gitu* kita melihatnya, bukan hanya karena janji yang sudah kami berikan, ya, Bapak, Ibu, mohon dipahami, tapi juga mengingat urgensi dari PJUTS ini kepada masyarakat yang memang benar-benar sangat membutuhkan.

Yang berikutnya, Bu, hari ini *kan* kita memang sedang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia terkait penyelesaian Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan, EBET biasanya kita menyebutnya. Tapi barusan juga saya melihat berita tadi Ibu juga *kan* menyampaikan terkait bauran, terkait investasi, dan lain sebagainya. Di 2025 itu kalau sesuai Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional RUKN yang baru diresmikan November kemarin 2023, saya baca beritanya *gitu*, Pak, Pak Dirjen Gatrik. Itu baurannya sudah ditetapkan 23%, ya, *kan*, padahal saya juga menunggu *report*-nya Ibu Prof akhir 2020 ini baru baurannya baru nyampai ke 14%.

Nah lalu saya baca berita lagi *nih* ada kebijakan investasi komprehensif bahwa di akhir 2030 kita harus sudah mencapai bauran 44%, ini apa-apaan? Bercandanya itu enggak lucu sama sekali *gitu loh*. Apakah Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini hanya fokus ke masalah investasi saja, sehingga kalau sudah *ngomong* terkait investasi itu apapun bisa *dinaikin gitu*, tanpa melihat bahwa ini itu target realistis enggak *sih* untuk dicapai, *gitu?* Transisi energi, *renewable energy* menurut saya *tuh* bukan bahan bercandaan Bapak, Ibu, ini *udah* menyangkut masa depan dari generasi kita *gitu*, generasi penerus *gitu*.

*Lah* kalau urusan investasi lagi-lagi lalu membuat angka-angka target yang enggak masuk akal ini *kan* apa enggak kita malah *diketawain* sama internasional? Apa enggak malah *diketawain* sama generasi kita sendiri *nih* generasi muda yang sudah mulai melek terkait transisi energi *gitu loh*, mereka melek *loh* Bapak, Ibu, mereka *ngikutin*. *Lah wong* capaiannya yang 2025 23% aja ini kita masih mikir caranya *nyampainya* itu *gimana gitu kan*, kok ada lagi 2030 44% sesuai kebijakan investasi komprehensif.

Mohon Ibu Dirjen yang kami banggakan, ini nanti coba kami diberi penjelasan kenapa sampai ada angka ini dan bagaimana cara kita untuk bisa mencapai ini.



Lalu sekarang saya beralih ke AML. Pak, persyaratan yang disampaikan oleh Kementerian ESDM, Dirjen Gatrik dalam hal ini, itu bukan hanya untuk calon penerima, Pak, tapi juga ditujukan ke kami-kami ini Anggota Komisi VII, betul tidak, Pak Ketua? Bagaimana kami harus mengawal sampai ke Banggar, sampai ke Bappenas, sampai ke Kemenkeu. Bukan hanya calon penerima ini yang *dikasih* syarat oleh Kementerian ESDM padahal yang butuh ini masyarakat kita *loh*, Pak, sama-sama eksekutif butuh, legislatif butuh *gitu loh*. Sehingga kami mohon sekali ke depan, Pak, kalau ada program yang kemanfaatannya itu langsung diberikan kepada masyarakat *udahlah*, Pak, enggak usah main apa, ya, saling lempar tanggung jawab model seperti ini *gitu loh*.

Bapak menyampaikan bahwa, tadi ada rekrutmen tambahan tenaga 100 orang untuk, apa Namanya, proses input data dan lain sebagainya, sama, Pak. Untuk mengumpulkan usulan 7.000, Pak, itu kami semua ini TA-TA juga lembur enggak pulang sama, Pak. Meskipun akhirnya ada yang *cuman* terealisasi 4.000, 4.500, bahkan ada yang *cuman* 1.000 di Pulau Jawa lagi, jadi sama *gitu loh*.

Kami mohon ke depan saya pikir kita semua sepakat *loh* teman-teman Komisi VII ini, coba dirasakan, ya, bansos itu *kan* tidak hanya ini *kan*, bentukannya macam-macam *gitu*. Bantuan sosial *kan* bentukannya macam-macam *lah*, entah ini disebut insentif dan lain sebagainya, subsidi atau yang lain-lain, *cuman kayaknya* yang paling *ruwet* persyaratannya itu *cuman* yang ada di AML ini *loh*.

Jadi kami mohon, apalagi tadi ditambah dengan ada politisasi, beda bendera, dan lain sebagainya itu juga alami, Pak, di daerah pemilihan kami, sama *gitu*. Jadi *kayak-kayak* kita DPR RI ini posisinya itu lebih rendah daripada kepala desa, Pak, coba Bapak bayangkan. Kami itu benar-benar harus mohon-mohon kepada mereka supaya mau *ngasih* rekomendasi kepada orang-orang yang sudah kami usulkan ini *gitu*. Itu aja belum lagi kalau para-para eksekutif itu *ngintrik* melarang kepada kepala desa untuk memberikan rekomendasi karena dianggap program ini *hoax*.

Bapak *bayangin*, program ini penipuan, saya mengalami sendiri, Pak. Kita dibilang memberikan program penipuan. Jadi kepala desa itu dilarang untuk memberikan rekomendasi, ini harus menjadi renunganlah untuk kita semuanya, karena ini *kan* intinya kita pengen membantu masyarakat, itu saja. Apa enggak ada jalan lain yang istilahnya lebih, ya, sama-sama manusia *gitu loh*, Pak, kita sejajar *gitu loh* sama-sama enaknya *gitu* gimana caranya *gitu*.

Ya mungkin itu Pimpinan yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya program-program semacam ini masyarakat di Dapil masing-masing dan di seluruh Indonesia karena yang dapat AML ini *kan* ternyata bukan hanya yang ada di daerah pemilihan kita, ya, Pimpinan, itu bisa benar-benar memahami bahwa kita berdiskusi istilahnya, ya berdiskusi *lah*, ya,



sekeras ini, sedetail ini, ya, untuk mengembalikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Itu saja, Pimpinan. Terima kasih atas kesempatannya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami akhiri.

*Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq,  
Wassalamikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,*

Silakan Pak Hendrik, lanjut.

**F-DEMOKRAT (Drs. HENDRIK H. SITOMPUL M.M.):**

Baik, terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang kami hormati,  
Pak Dirjen Gatrik,  
Ibu Dirjen EBTKE, salam kenal, Bu,

Terima kasih atas jumpaan kita di RDP ini, dan juga

Bapak, Ibu jajaran dari Gatrik dan EBTKE.

Saya kira apa yang disampaikan teman-teman sebelumnya itu merupakan ungkapan hati kita dan dalam penyampaian, tapi saya menambahkan hanya untuk khusus untuk apa juga AML, Pak, Pak Dirjen.

Catatan kami pertama adalah itu adalah tim verifikatornya, Pak. Jadi kelihatannya tim verifikator ugal-ugalan di daerah saya, Pak, karena apa? Mereka merasa bahwa itulah ini *kan* terkait dengan *attitude*, ya, kami enggak dapat *gitu loh*. Ini *kan* sangat membahaya verifikator sendiri meminta bagian *gitu* dalam pembagian AML, itu akhirnya di daerah tertentu itu daerah itu tidak dilakukan verifikasi makanya kemarin saya komunikasi, Pak, itu *loh* daerah Deli Serdang itu yang tidak melakukan verifikasi mereka.

Kenapa? *Attitude*-nya mereka merasa kami aja enggak dapat *gitu loh*, itu, Pak, itu-itu yang membahayakan dari tim verifikator yang akhirnya memang jumlah kita sangat berkurang jauh, itu terkait verifikasi.

Dan penyaluran kami sangat banyak menemukan bahwa, program itu adalah disampaikan itu program PLN dan PT Pos, bukan-bukan Komisi VII, enggak. Jadi masyarakat itu tahu itu adalah program PLN dan PT Pos, Komisi VII. Ini kita deteksi ketiga misal, kita menyampaikan setelah mereka terima kita

datang lagi *gitu*, Pak, Pak Dirjen, tapi mereka katakan “Enggak, enggak, ini bukan programnya Pak Hendrik ini, ini program PT PLN”, satu lagi, “Ini program PT Pos” katanya, ini-ini Pak Diren yang kami temui, jadi wajar *aja* kita jadi tidak disayangi masyarakat kita *gitu* ketika akhirnya *gitu loh*. Karena memang yang disayangi itu adalah PLN dan PT Pos, Gatrik sendiri enggak disayangi *gitu loh*, ESDM sendiri enggak diingat *gitu*, yang diingat itu PLN sama PT Pos. Itu, Pak, *sharing* aja untuk Pak Dirjen.

Untuk Ibu, saya kira kita dengan pihak kontraktor baik, Bu, ya. Jadi karena memang kendala kami kemarin ada kepala daerah yang tidak memberikan rekomendasi dan kami mencari solusinya dan dapat cuma memang akhirnya diproses begitu dan kami tetap komunikasi dengan pihak kontraktor dengan baik dan ini lagi berjalan, Bu.

Saya tidak menanya itu, Bu, saya hanya menanya terkait adanya ada penentuan ongkos angkut FAME *biodiesel* yang katanya ditetapkan oleh EBTKE. Saya mau tau, ini latar belakangnya kenapa EBTKE menentukan ongkos angkut ini, padahal yang membayar itu bukan EBTKE, bukan Dirjen EBTKE tapi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang ini-ini kelihatannya ada case sekarang Pak, Bu ini, badan ini, iya ini ada case sekarang ini badan kelapa sawit ini ada kasus juga ini sekarang, *corruption* juga.

Nah sekarang saya mau nanya ini apa kaitannya dengan EBTKE dengan badan ini, iya, apa badan hukumnya, apa-apa ya *legacy*-nya apa *gitu* kenapa *kok* EBTI, EBTE terkait dengan ongkos angkut *biodiesel* atau FAME ini.

Demikian, terima kasih, Pimpinan.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Izin, Pimpinan, tambah dikit boleh?

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Ya, silakan, Pak Nasir.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

*Makasih*, Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VII,  
Teman-teman Anggota Komisi VII,  
Saudara Dirjen Ketenagalistrikan, dan  
Dirjen EBTKE, dan  
Seluruh jajarannya.



Mungkin mau *nambahin* masukan teman-teman tadi, pendapat teman-teman, izin, Pimpinan, interaktif. Mungkin proyek apa namanya *rice cooker* ini, ya, AML, ya, ini proyek gagal, Pak, menurut saya, karena manajemen di Kementerian ini *ndak* siap, *ndak* siap dan *ndak* ada orangnya, *ndak* bertanggung jawab tentang regulasi anggaran ini.

Nah harusnya di Dirjen-Dirjen lain kita didampingi oleh Kementerian sampai barang ini ke tangan masyarakat, nah tapi hari ini proyek, apa tadi namanya, AML ini memang saya sendiri mungkin sama dengan teman-teman ini kita-kita aja enggak bagi Pak, yang bagi orang Pos. Nah saya enggak ngerti bagaimana komunikasi manajemen yang dibangun Kementerian ESDM.

Saran saya dari Fraksi Demokrat ini harus diaudit BPK, supaya *clear* di mana letak tanggung jawab dan regulasi anggaran yang disiapkan negara untuk kepentingan masyarakat tadi. Nah ini izin, Pimpinan, mungkin Pimpinan mengirimkan surat ke BPK untuk mengaudit proyek ini, karena tidak tepat pada sasaran dan kenapa diciptakan proyek yang tidak punya tanggung jawab ini, karena kita tidak menemui komunikasi antara Komisi VII dengan Kementerian yaitu, Dirjen Ketenagalistrikan ini. Yang bertanggung jawab siapa penanggung jawabnya, siapa Pimpronnya, siapa yang ditugaskan dari Kementerian ESDM yang ada di lapangan untuk bersama-sama Komisi VII menerima barang tersebut.

Nah jadi ini menurut saya proyek abal-abal ini, enggak jelas, Pak. Anggarannya ada, disiapkan negara, sarannya ada, tapi regulasi administrasi yang disiapkan Kementerian ESDM bodong. Uangnya dikeluarin tapi orangnya enggak ada. Nah saya minta ini harus diaudit BPK, karena harus dijelaskan temuannya jelas bahwa administrasi Dirjen Ketenagalistrikan itu tidak ada di lapangan untuk menyaksikan penyerahan barang tersebut. Nah itu dan saya telepon Dirjen ini juga enggak tanggung jawab Dirjennya cuman lempar, lempar, lempar, tanya Direkturnya juga sama, nah beda dengan Dirjen ketenaga, Dirjen EBT lampunya ada, barangnya ada, kontak personnya ada, komplainnya ada, nah di situ barangnya ada *gitu*. Ada juga yang sampai hari ini belum terpasang EBT ini nah *gitu*, kontraktornya lari ada juga EBT itu.

Nah jadi saya minta proyek-proyek yang tidak bertanggung jawab seperti ini kita minta untuk diaudit BPK, nah supaya *clear* bahwa anggaran ini negara hutang untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dan sarannya ada *gitu*, tapi manajemen yang dibangun oleh Dirjen Ketenagalistrikan ini tidak ada dalam lapangan dan tidak ada serah terima antara fungsi anggaran yang disiapkan Kementerian pada sasaran masyarakatnya tidak ada yang mendampingi manajemennya. Jadi seperti proyek bodong-bodong ini, Pak, enggak bertuan, kita aja kelimpungan kita bilang siapa yang dikoordinasi ini, *ujuk-ujuk* barangnya yang ngubungin kita orang Kantor Pos, ditanya lagi nanti orang Kantor Posnya sudah dibagi, Pak. Jadi kita pun **bingung** ini proyek apa, siapa ini yang menciptakan regulasi administrasi ini.



Saya minta melalui forum ini, tolong dijelaskan Pak Dirjen bagaimana anda membuat administrasi manajemen proyek sebesar ini anggarannya, mohon izin, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Silakan.

**DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Ir. JISMAN P. HUTAJULU, M.M):**

Izin, Bapak Pimpinan.

Jadi awalnya memang apa namanya ini proyek ini *kan* atas inisiatif dari Bapak, Ibu ya di awal-awal kemudian kita lakukan apa namanya *trilateral meeting* karena terkait juga dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas, jadi memang di awal.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Sebentar, izin Pimpinan izin.

Anda jadi Dirjen harus bertanggung jawab atas mata anggaran ini, Pak. Anda sebagai Dirjen bertanggung jawab atas anggaran ini, jadi anda jangan bilang "Ini-ini inisiatif DPR ini semua kepentingannya untuk masyarakat" Bapak harus *pahamin*, anda di situ menjalankan regulasi APBN. Yang saya tanya sekarang, kenapa administrasi ini tidak ada yang waktu penyerahan barang tidak menyertakan Komisi VII sebagai pemilik anggaran, sebagai penerima anggarannya Bapak, sebagai menjalankan anggaran itu Kementerian ESDM di Dirjen Kelistrikan tidak ada di lapangan dan tidak memberitahu dan sistem yang Bapak buat itu sangat-sangat rumit dan tidak-tidak tahu siapa tim yang bertanggung jawab di situ.

Nah itu yang saya yang saya minta jawabannya. Siapa yang membentuk regulasi administrasi ini sampai kami sebagai penanggung jawab pengawasan anggaran tersebut sampai ke masyarakat tidak tahu siapa yang bertanggung jawab tentang anggaran yang kami *setujuin* ini, silakan.

**DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Ir. JISMAN P. HUTAJULU, M.M):**

Ya, terima kasih Pak Nasir.

Sebenarnya di dalam pelaksanaannya yang hanya 2 bulan ini, Pak Nasir, mulai tanggal 20 Oktober kami bisa mendapatkan anggaran itu bisa dieksekusi kemudian berakhir dengan 18 Desember kami bisa melakukan



kontrak, maka dalam tempo 2 bulan ini ada usulan apa namanya calon penerima dari kepala desa untuk 500.000 dan perlu *cleansing* dan segala macam untuk data tersebut, Bapak.

Kami sebenarnya setiap minggu paling sedikit, ya, atau bahkan sekali sekali 3 hari ada rapat-rapat melalui Zoom, Bapak, hanya saja mohon maaf untuk yang lain kami mendapatkan informasi TA-nya aktif mungkin dari Bapak mungkin kurang sehingga kurang informasinya, demikian, Pak, yang kami terima, Pak Nasir.

#### **F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Izin, Pimpinan.

Pak Dirjen, Bapak tadi bilang kepala desa, kepala desa yang mendapatkan bantuan itu *aja* tidak tahu bantuan itu dari mana. Nah bagaimana administrasinya itu yang saya tanya. Administrasi yang Bapak bilang tadi seperti apa, kepala desa yang mendapatkan masyarakatnya bantuan itu tidak dikonfirmasi, tidak dikonfirmasi. Nah siapa regulasi penanggung jawab dari struktur yang anda berikan dan ini tidak terbangun seperti di Ditjen-Ditjen lain.

Nah saya khawatir anda enggak mampu mengelola barang ini tapi anda buat regulasinya kacau balau seperti ini. Ini sekarang terjadi ini, Pak, ini jadi temuan ini, anggarannya tidak tepat pada sasarannya dan administrasi yang Bapak buat itu sangat-sangat jelek dan tidak menjadi contoh yang baik buat kami di Komisi maupun di masyarakat, itu yang terjadi sekarang.

Kami sendiri sebagai peregulasi yang *ngawasin* barang ini dan *menyetujui* program ini, kami *menyetujui* programnya, mengusulkan bantuan buat masyarakat, *menyetujui* anggarannya, yang menjalankan regulasi itu Kementerian. Nah sekarang kondisi di lapangannya masyarakat pun banyak yang tidak mendapatkan barang tersebut.

Yang kedua, yang bertanggung jawab atas proyek ini di lapangan kami pun tidak tahu dari Kementerian Bapak siapa, yang kami *temuin* terakhir cuma orang Kantor Pos dan dia tidak secara teknis memahami regulasi ini, bagaimana mengadakan kerja sama dengan orang yang tidak memahami regulasi ini. Saya dengan Direktur EBT ini sering rapat, boleh ditanya, Pak, benar *kan?* Pak siapa Namanya? Nah sering rapat sama beliau, saya sampaikan berapa yang rusak, di mana yang *udah* dipasang, kontraktornya lari saya tanya, itu saya tanya dan dia bertanggung jawab atas mata anggaran tersebut.

Nah anda siapa yang bertanggung jawab di sini coba, yang bisa kami komunikasi siapa? Siapa yang bertanggung jawab atas proyek ini coba, izin Pimpinan.



**DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Ir. JISMAN P. HUTAJULU, M.M):**

Kami sendiri, Pak, bersama Direktur terkait.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Siapa? Mana Direktornya, coba tanya. Pernah saya telepon, terus apa jawabannya? Coba silakan.

**DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Ir. JISMAN P. HUTAJULU, M.M):**

Pak Pimpinan mohon izin.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Siapa di bawah dia coba jelaskan, di bawah dia siapa yang bertanggung jawab, terus siapa yang ada di lapangan seperti EBT ini, coba jelaskan.

**DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Ir. JISMAN P. HUTAJULU, M.M):**

Iya izin, Pak, Bapak, ya memang sehari-hari kami, Pak, yang menangani, ketika Bapak telepon juga ketika usulan beberapa usulan masuk dan ada usulan yang disusulkan karena.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Bukan Pak, yang saya tanya siapa orang Bapak yang menerima di lapangan mendampingi Anggota Komisi VII, tunjukkan orangnya, itu yang saya tanya. Anda *kan* punya Pimpro mana Pimpronnya, mana di bawah Pimpro sebagai panitia untuk penerima barang, mana orangnya. Kita enggak ketemu *nih* orangnya, kalau EBT ada orangnya, kita panggil mereka *nunjuk* bironya siapa, siapa pekerjanya kita panggil datang ke rumah saya, benar *kan*? Ada.

Nah yang Bapak kerjakan proyeknya administrasinya kita enggak paham siapa orangnya, coba dihadirkan di sini, mana orangnya? Mana yang mendampingi Anggota Komisi VII untuk menyerahkan barang itu kepada masyarakat, mana orangnya? Ini *kan* proyek, ini proyek yang enggak bertanggung jawab, enggak ada, Pak, orangnya, orang itu enggak ada di hadir di lapangan dan Bapak sendiri enggak tahu benar atau enggak masyarakat itu yang akan menerima barang itu, enggak tahu Bapak. Ini proyek apa, pengawasannya seperti apa, regulasinya seperti apa, ini *kan* barang anggaran negara.

Saya tanya siapa yang menerima barang dari Kementerian yang ada di lapangan, sebut namanya.

**DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Ir. JISMAN P. HUTAJULU, M.M):**

Ya, Pak, izin, memang kami ketika ada apa penyaluran dan segala macam itu ada pengawas kami menunjuk dari Balai Besar survei dan Pengujian EBTKE.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Siapa Pak, siapa orangnya? Mana orangnya hadirkan sini, di Dapil saya siapa orangnya, coba Bapak sebut *aja* namanya siapa, pernah enggak *nelepon* saya.

**DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Ir. JISMAN P. HUTAJULU, M.M):**

Ya memang mohon maaf, Pak, kami akan *crosscheck*, Pak, yang ketika.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Oh *ndak*, Pak, ini dilihat ini sama masyarakat. Bapak jelaskan siapa, siapa namanya? Masa anda sendiri enggak tahu siapa yang menerima barang di lapangan bersama kami, *kan* aneh. Ini Pak Dirjen kamu yang bertanggung jawab atas anggaran ini tapi kamu enggak bertanggung jawab.

**DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Ir. JISMAN P. HUTAJULU, M.M):**

Izin, Pak, pengadaan di kami, Pak, iya *kan*, Pak, benar. Kemudian pendistribusiannya karena ini *kan* jauh sekali, Pak, jadi kita berikan kepada PT Pos untuk melaksanakan melalui kontrak.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Pak Dirjen, Pak Dirjen, di dalam regulasi anggaran ini kita tidak pernah melibatkan badan lain untuk menyerahkan distribusi barang didampingi oleh yang bertanggung jawab atas mata anggaran itu. Bapak boleh tunjuk kontraktornya, kontraktornya beda terus penyalurnya Kantor Pos, siapa yang menugaskan Kantor Pos atas pertutujuan apa, pernah kita rapatkan di sini? Enggak ada, enggak ada, Pak, Bapak boleh jelaskan di dalam forum rapat ini dulu, setuju enggak tentang penyaluran regulasi itu. Siapa yang bertanggung



jawab tadi, saya tanya siapa yang bertanggung jawab di bawah struktur anda sebagai pertanggungjawaban proyek mana orangnya, siapa namanya, itu yang saya tanya. Berarti kalau enggak, anda membuat anggaran ini fiktif, karena enggak ada orangnya, mana orangnya, sebut namanya siapa *biar* kita panggil lagi dalam rapat berikutnya. Nama orangnya, Pak, yang saya tanya, nama orangnya, jabatannya apa, mana orangnya, ke mana *aja* dia coba.

Ini enggak jelas dipakai anggarannya, orangnya enggak ada, diregulasinya dijalankan orangnya enggak ada, komunikasinya enggak ada, semua komplain *nih* teman-teman Komisi VII seluruhnya komplain, 7.000 satu Anggota untuk membagikan ke daerah, semua gagal. Berarti proyek ini gagal berarti anggaran ini kemana makanya saya minta ini harus diaudit BPK menurut saya anggaran ini fiktif, orangnya enggak ada tapi uangnya dikeluarkan.

Saya tanya tadi *ama* anda, anda *aja* enggak bisa jawab siapa regulasi yang mendampingi kami penyerahan barang ke masyarakat, mana orangnya hadirkan di sini.

**DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Ir. JISMAN P. HUTAJULU, M.M):**

Izin, Pak-Pak Nasir, karena memang lokasinya itu.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Yang saya tanya *aja*, Pak yang dijawab, mana orangnya? Anda jangan buat anggaran ini fiktif. Mana orangnya, *biar* kami *tanyain* di sini apa yang dikerjakan, apa yang dibuat. Saya minta Pak Irjen cek barang ini.

**DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Ir. JISMAN P. HUTAJULU, M.M):**

Sebenarnya ada tim penerima sama tim pengawas, Pak, kami berkoordinasi.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Pak, saya minta sebut namanya dari regulasi, regulasi ada enggak *nelepon* semua Anggota DPR yang di sini? Ada enggak dia di lapangan pada waktu penyerahan alat ini, mana orangnya?



**DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI  
SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Ir. JISMAN P.  
HUTAJULU, M.M):**

Kami harus cek dulu, Pak, siapa yang ditugaskan oleh tim pengaawas di lokasi.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Saya usul melalui forum ini, Dirjen ini harus diganti karena enggak bisa menjalankan regulasi anggaran. Anda buat anggaran ini main-main karena bahwa anggaran ini hutang negara, jangan dimain-mainkan, Pak. Semua regulasi yang didapat kami ini jadi masalah, kelimpungan kami lihatnya ditelepon, *udah* dibagi, Pak, kita pun *gini*, ya, dibagi *kayak* mana ini. *Udah* dibagi dan kami tidak dikonfirmasi tentang barang ini, entah dari langit datang orangnya dari mana datang *nelepon* siapa ini saya pikir, siapa yang menugaskan anda. Saya tanya siapa yang nugaskan anda *aja* dia enggak bisa jawab, mana dan enggak ada regulasi rapat untuk kita serahkan melalui Pos, regulasi itu salah, Pak.

Ini semua ini *udah* bertahun-tahun kita pakai PJUTS enggak pernah punya masalah langsung ke masyarakat, langsung ketemu orangnya, langsung didampingi oleh Kementerian EBT, kenapa Bapak buat pola yang *njelimetnya kayak gini* dan orangnya enggak ada, anggarannya Bapak serap, mana anggarannya? Berapa anggaran untuk proyek ini? Bapak enggak tahu Pak Dirjen, aduh kacau Bapak ini.

**DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI  
SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Ir. JISMAN P.  
HUTAJULU, M.M):**

322 miliar, Pak.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Berapa?

**DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI  
SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Ir. JISMAN P.  
HUTAJULU, M.M):**

Terakhir, 322 miliar yang terealisasi adalah 176 miliar. Kami bisa melaksanakan 68%

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):**

Ini kalau bangun jembatan kata Pak Presiden Jokowi *udah* jadi satu jembatan, yang jaraknya mungkin **hampir** 400 meter hampir setengah kilo *udah*



jadi *nih*. Nah sekarang proyek ini kita enggak tahu di mana barangnya, mana orang yang bertanggung jawab mendampingi Komisi VII untuk menerima barang ini.

Nah saya izin pimpinan melalui forum ini saya minta satu untuk copot Dirjen dan Direktur yang seperti ini. Yang kedua, kita minta masukkan laporan kegiatan ini ke BPK dan ke KPK, karena orangnya enggak ada, uangnya diserap. Dan bagaimana kontrak yang dibuat mereka tentang regulasi seperti ini dan seluruh yang ada di proyek ini saya minta diperiksa oleh pihak hukum, karena 300 miliar uangnya.

Nah ini Dirjen enggak tanggung jawab agak kerepotan kita. Nah itu, mungkin itu, Pimpinan. Melalui forum ini kami dari Fraksi Demokrat untuk mengusulkan bahwa, proyek ini untuk diaudit BPK, Dirjen ini untuk dicopot dan seluruh regulasi yang di dalam ini untuk dicopot karena enggak bisa menjalankan anggaran yang sudah menjadi anggaran untuk disalurkan kepada masyarakat dan sistem administrasi yang dibangun oleh Dirjen Ketenagalistrikan ini menurut saya *amburadul*, alias tidak sesuai dengan administrasi yang dijalankan oleh Dirjen-Dirjen lain. Karena kami juga jalankan sama, Pak, di Dirjen Migas kami ada bantuan untuk *buat* masyarakat, di Dirjen EBT kami bantuan untuk masyarakat administrasinya ada, masyarakatnya ada, dan staf-staf Kementerian ini yang di Dirjen masing-masing ada di lapangan, ketemu rapat dengan kita, direktornya kita panggil rapat, duduk bareng minta penjelasan dijelaskan, dengan calon penerima kita temukan ketemu, benar, Pak? Nah kenapa mereka enggak seperti ini, kenapa proyek sebesar ini dijalankan kalau administrasinya belum siap itu kesalahan anda, bukan kesalahan forum ini, jelas.

Jadi saya minta izin Pimpinan masukan tadi terakhir dari Fraksi Demokrat untuk mengaudit BPK, melaporkan kegiatan ini kepada pihak hukum dan yang terakhir meminta kepada Menteri untuk mencopot Dirjen-Dirjen dan Direktur yang tidak bertanggung jawab seperti ini, mungkin itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi Ta'ala wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Waalikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Baik, terima kasih Pak Nasir atas masukannya dan pandangannya.

Kami lanjutkan Pak Dr. Mulyanto, silakan, Pak.



**F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):**

Baik, terima kasih.

Pimpinan yang kami hormati, serta  
Anggota yang banggakan,  
Pak Dirjen dan Ibu Dirjen.

Ini Pak Nasir Pak Dirjen dan Ibu Dirjen baru dilantik Pak berapa hari yang lalu, sudah mau diminta diberhentikan ini. Pak Dirjen, Ibu Dirjen, itu Pak Nasir enggak marah *loh*, Pak, ya, belum apa-apa itu, sama, saya juga enggak akan marah karena ini *kan* bulan Ramadan, Pak, ya. Pak Dirjen juga *udah* minta maaf di awal-awal minta maaf karena waktunya mepet *gitu*, karenanya saya juga enggak ingin panjang lebar, unek-unek saya sudah hampir disampaikan oleh teman-teman semua.

Yang terkait EBT, ya, memang pelaksanaan tahun ini tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya. Surat cinta dari Dapil saya *udah* saya sampaikan, ya, Bu, ya, mudah-mudahan bisa diselesaikan.

Terkait AML saya rasa dari sekian banyak bantuan kepada masyarakat program ini yang paling betul-betul menguras batin kita. Terus terang sangat menguras sekali teman-teman sudah menyampaikan, Pak Nasir juga sangat jelas sekali. Kalau di tempat saya itu jatah saya 7.000 Banten, saya hanya terima 2.000 sedikit, di Banten cuma 5.000-nya enggak ada. Tapi di sini dituliskan jatah 14.000 target untuk dua orang, ya, saya dan Pak Zulfikar realisasinya 14.700, menarik datanya lebih daripada target padahal saya enggak *nerima*, hanya 2.000.

Tapi saya tahu fakta di lapangan. Ada satu Kecamatan yang tidak pernah saya usulkan, menerima 3.000. Sampai peresmian terakhir bersama Dirjen Gatrik tertulis angka 3.000, nama kecamatannya, Kecamatan Kresek. Dari mana *nih*, Pak, bisa ada begini saya tanya, ini usulan Pemda, Pak, katanya. Luar biasa, untung bukan di tempat Pak Nasir, kalau tahu Pak Nasir lebih ngamuk lagi.

Saya dari 7.000 cuma dapat 2.000, ada usulan Pemda 3.000 enggak pernah tahu saya usulannya itu. *Eh*, di ujung sini pun tertulis ya Banten 14.000 bahkan melebihi target. Baik, oke enggak jadi masalah sudah lewat itu, Pak, ya, saya juga enggak marah, hanya unek-unek *aja*.

Menurut saya penyebabnya memang yang sangat pendek sehingga terjadi politisasi di tingkat kepala desa, PLN juga begitu dan juga Kantor Pos. Yang paling luar biasa menurut saya adalah tidak adanya *feedback* kepada kami ketika *surveyor* dari PLN atau verifikator dari PLN, ya selesai tugasnya. Jadi dari 7.000 yang dia survei 2.000, ya, *udah* selesai, *final*, enggak minta *feedback* sehingga kita bisa lengkapi kita perbaiki, padahal lengkap hanya merekanya yang malas. Nanti Bu Andi bisa lebih jelaskan, verifikator ini PLN



yang sangat bermasalah, sangat bermasalah, persis seperti program pasang listrik baru yang pertama kali, yang kedua *udah* jadi bagus, persis sama problemnya di tingkat itu.

Kemudian di tingkat Kantor Pos juga serupa. Okelah itu sudah lewat, saya hanya ingin satu menyampaikan hal penting, sisa anggaran dari realisasi hanya 68% itu sebesar 146 miliar. Kami minta agar anggaran sebesar ini dapat diluncurkan kembali untuk *me-recovery* yang tidak menerima itu.

Tadi EBT juga, apa, melakukan hal yang sama, ya. Nah saya minta untuk Dirjen Gatrik segera, **mereka yang memproses**, agar sisa anggaran ini digunakan untuk nomenklatur yang sama, tidak pindah nomenklatur, sehingga kita bisa mengobati perasaan masyarakat.

Demikian dari kami.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh,*

Lanjut dari Fraksi PAN, Ibu Andi Yuliani Paris.

**F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):**

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang saya hormati Pimpinan,  
Yang saya hormati Dirjen Gatrik, Dirjen EBT.

Sebelum ke penjelasan, saya minta coba diketik dulu, saya mengusulkan untuk-untuk salah satu kesimpulan rapat nanti bisa drafnya *aja* dulu, nanti didiskusikan bersama-sama. "Mendesak Kementerian ESDM dalam hal ini Dirjen Gatrik, maaf, Dirjen EBT untuk merealisasikan atau merealokasikan anggaran untuk merealokasikan anggaran untuk menyelesaikan PJUTS 2023 antara lain dari anggaran, anggaran 101 miliar." Kenapa saya sebut anggaran itu? Karena anggaran itu 101 miliar yang untuk itu *tuh*, yang mana itu yang tiba tiba ada program bentar, program perencanaan pembangunan Monev infrastruktur Migas, Gatrik, dan EBTKE 12 kegiatan 101,32 M, ini salah satu usulan untuk kesimpulan rapat.

Kenapa ini penting, Pak Dirjen? Anggaran ini *nih* penghinaan terhadap DPR. Kenapa saya katakan penghinaan? Hak budget itu *kan* ada sama kita, dibunyikan dalam Undang-Undang Dasar. Kita berdiskusi panjang Juni, Juli, Agustus, di-di kesimpulan rapat 30 Agustus saya melihat tidak ada yang 101 M



itu, tidak ada anggaran untuk itu, tiba-tiba ada muncul, ini enggak boleh ini penghinaan terhadap DPR yang punya hak anggaran, karena 101 ini enggak ada, ya. Jadi saya salah satu kesimpulan rapatnya itu.

Kedua, ya, kedua untuk, ya ini terkait dengan kesimpulan strategi penyelesaian program PJUTS, di sini Bapak menuliskan akan merealokasikan. Di Dapil saya Pak, 95% itu belum terpasang PJUTS-nya, 95%. Saya kemarin cek satu per satu *loh*, adapun yang sudah terpasang tiba-tiba di satu desa di Kabupaten Bulkumba itu pun mati, ya. Jadi tolong cek satu per satu. Kenapa perlu cek? Saya juga cek, Bapak cek, supaya tahu jangan dibohongin oleh kontraktor yang sudah terpasang ternyata laporannya belum terpasang *gitu loh*, jadi harus cek satu per satu usulan dari masing-masing Anggota.

Kedua, eh ketiga *nih*. Tadi Pak Mulyanto, Bu Ratna semua terkait dengan AML, kalau saya sih saya apresiasi lah Pak Hafid bagus selalu kita berteleponan, kadang-kadang kasihan juga Pak Hafid, ya, Pak-Pak Direktur karena aduh PT Pos  *gimana sih, gitu loh*. Bapak tahu enggak PT Pos *nih* mengirim surat, saya hampir saya somasi PT Pos, sekarang sudah menulis surat permin, bayangin pejabat tinggi PT Pos datang ketemu saya di Kabupaten Bone karena saya hampir melaporkan ke polisi staf PT Pos karena dia mendorong staf saya ketika kami akan membuat video. Itu sudah pelanggaran dengan menyentuh badan, mendorong dan PT Pos saya minta datang pejabatnya datang menemui saya waktu itu menjelang Pemilu untuk minta maaf. Saya bilang saya enggak mau terima permintaan maaf lisan, anda harus menulis surat secara tertulis minta maaf pada saya dan kedua anda harus mutasi staf PT Pos di Kabupaten Bulukumba yang mendorong staf saya, ya, dan suratnya sudah ada.

Karena seakan-akan dia yang berkuasa *gitu loh*. Kita mau *bikin* video, mau bertemu dengan calon penerima yang kami usulkan didorong. Saya juga ada di situ tadinya, saya ada di situ, tapi karena saya pergi, staf saya di situ duluan, ya. Kita mau *bikin* video, ya, ya terima kasih sudah mendapatkan alat apa alat masak listrik, *udah* keluar sana keluar dan akhirnya terakhir didorong. Dan saya minta tiga pejabat tingginya PT Pos datang *nemuin* saya di Kabupaten Bone, *ngapain* Bapak datang ke sini saya bilang, "Ya, Bu, kami mau minta maaf", saya bilang enggak mau permintaan maaf lisan, anda harus buat permintaan maaf tertulis dan dia buat tertulis dan kedua saya minta mutasi staf PT Pos itu, karena saya sudah hampir laporkan polisi, tapi kalau saya lapor polisi *kan* ribut semua *nih*, Bapak juga kena periksa semua *nih*, ya, *udah* akhirnya dia sudah *bikin* surat.

Nah jadi karena masih ada anggaran 146,44 miliar ini kalau bisa, Pak, direalisasikan, kenapa? Ya wajib karena ada uangnya. Kenapa, Pak? Ini lucu *emang*, Pak Hafid tahu *tuh*, saya banyak *forward* percakapan. PLN ini memang, PLN ini memang agak ini, jadi ada orang mau masyarakat *udah* mau datang tunggu survei, enggak bisa siang, sore *aja* kata masyarakat ke sawah pulangnya sore, oh, *nggak* mau. Akhirnya setiap masyarakatnya siap, PLN-nya enggak mau datang-datang bilang sibuk katanya *gitu*. Ada itu percakapannya,



ya, Pak, ya, waktu itu saya *screenshot*, ya, Pak Hafid, ya. Akhirnya beratus-ratuslah gagal calon penerima AML ini dan lucunya *kan* mungkin sistemnya *by data*, ya, Pak Hafid, ya, jadi ketika dia habis survei dia kirim ya *by link* ya.

Ada di Kabupaten Maros yang disurvei tidak dikirim ke Kementerian, yang tidak disurvei masuk dikirim dan dapat barangnya. Ya *kan* kami di protes, ini lucu banget, ya, *udahlah* saya bilang ini yang salah PLN, ya, saya agak belalah ESDM. Tapi sistem *monitoring*-nya itu *loh*, Pak, harusnya ada sistem *monitoring* berapa *sih* sebenarnya, apa alasannya.

Paling lucu ada, ada orang yang di dalam kompleks perumahan di kota, apa jawaban PLN? Alamat tidak ditemukan padahal itu *cuman* jaraknya di Kota Sengkang, Kabupaten Waje, saya jadi ketawa *aja*, ini PLN benar-benar *deh*, ya.

*Cuman*, Pak, ada kata-kata Bapak tadi agak menyakitkan hati saya, "Karena kepala desalah yang lebih mengetahui masyarakatnya", lebih tau kita, Pak. Sakitnya masyarakat mau melahirkan, enggak sekolah, kurang makan, anaknya kurang susu, tahunya Anggota DPR, Pak. Jadi dengan dengan lewat kepala desa itu, itu penghina juga terhadap Anggota. Jadi cukuplah Kementerian ESDM ini jangan selalu menghina *gitu loh*, ya.

Saya dulu Anggota DPR, Pak, 2004-2009 kalau anggaran enggak kita setuju, Pak, kita suruh pulang, Pak, kita usir. Agak baik sekarang Anggota DPR zaman ini, kita suruh pulang karena kita punya hak konstitusi *gitu*.

Nah kemudian itu terkait juga, jadi saya di Dapil saya *tuh* sekitar 5% baru terpasang, padahal *kan* daerah Sulawesi Selatan Dapil saya enggak susah-susah amat *gitu loh*, ya. Jadi kemudian waktu itu saya WA Pak-Pak Hen, Pak Hen siapa *ndak loh* yang Direktur sekarang diganti Pak-Pak Senda yang mana ya, Pak, ya, Bapak, ya, kalau sebelumnya Pak siapa? Pak Hendra, Pak Hendra ya. Selalu sama Pak Hendra, "Ya, Bu, sedang bahan bakunya," jadi saya *nggak*, ini saya *udah* lihat, Pak, galian banyak sekali jadi suka diledekini ini galiannya, "Bu ya mohon maaf ditutup sama ini aja sama papan dulu saya bilang supaya anak-anak enggak jatuh" ada di semua kabupaten itu.

Jadi ini Bu Eniya ini Bu Eniya, Ibu *kan* peneliti *nih*, Bu, nanti tolong Ibu ambil semua usulannya Anggota *nih* Ibu cek satu-satu mana yang terpasang supaya *cocokin* jangan sampai klaim mereka minta uang ini Waskita, ya, kalau tidak salah, nanti takutnya tidak terpasang, sama dengan BPBL sebenarnya saya juga ada kecurigaan, sama juga dengan Jargas di Dapil saya ada kecurigaan. Kenapa? Kontraktornya melaporkan Kementerian pasang 6.000 sambungan gas atau 8.000 BPBL, sebenarnya *sih* enggak seperti itu *gitu loh*, tapi diklaim bayarannya sesuai dengan jumlah yang di-di-di ini, tapi pembayarannya enggak ini harus hati-hati jadi kasihan juga kalau ESDM di bodoh-bodohi. Nanti dia bilang, "Ya, Bu, Jargas sudah terpasang sekian", tapi saya tau banyak yang diloncat-loncatin *gitu loh*, rumah-rumah orang, ini banyak kejadiannya harus hati-hati.



Nah kemudian saya juga ingin sampaikan bahwa, apa Namanya, tadi untuk AML, ya, di-diselesaikan, jadi banyak data yang data yang ini. Oh, ya, ini temuan *nih*, Pak, Bapak di sini menulis harga Miyako 370.000. Saya ketemu di toko sebenarnya di toko *loh* bukan tingkat grosir, saya *videoin tuh* Pak Hafid, "*Nih* saya lagi di toko *nih* Pak Hafid *nih* harga Miyako cuma 256.000 di sini naik 120.000 *nih* dari harga Bapak 370.000," *nih* temuan *nih*, Pak, harganya 256.000 di toko yang tokonya agak bonavit *gitu*. Artinya dia sudah naik sebenarnya, mungkin harga grosirnya kurang dari 256.000, ada videonya, Pak, ada harga label harganya *tuh* saya *fotoin* Pak Hafid *tuh*, ya, Pak ya. Ada *kan* Bapak saya kirimkan Pak Direktur, lagi di toko saya *bikin* video *nih*, Pak, ini harganya 256.000 Miyako, ya.

Jadi ini harus hati-hati *nih* untuk penentuan harga ini bisa jadi temuan, Pak. Jangan sampai apa namanya, *kan* waktu itu *kan* Bapak ESDM pernah saya protes *kan* didatangi sama KPK *kan* gara-gara saya, ya *kan*? Terus KPK ingin ketemu saya minta semua data-data lagi, terus saya bilang, "Ya, *udahlah* Bapak *kan* sudah datang ke ESDM," saya bilang *sama* KPK, "*Udah* Bapak data itu *aja* Bapak pegang." Ini 370.000 bayangkan kalau unitnya 103 kali 120.000 perbedaannya *tuh* berapa itu, ya *kan*? Berapa itu, Pak? Itu *udah* harga toko, coba kalau harga yang di toko biasa itu lebih murah lagi dari 256.000 untuk Miyako.

Jadi *kan* semua penerima, jangan bilang tipenya enggak sama, penerimanya saya suruh *fotoin*, yang kamu terima tadi foto, ya, terus saya bandingkan saya bawa ke toko ada enggak yang tipe kayak begini? Oh ada, Bu, ini, saya lihat, oh, ya harganya sekian, ya.

Kemudian, Pak, kalau memang nanti 100, 146,44 miliar untuk AML ini di apa namanya direalisasikan, tolong metodenya dirubahlah, tidak usahlah gunakan PT Pos, ya, *kan*. Karena PT Pos juga agak, kenapa ongkos kirimnya cukup besar juga 133.000, 133.178 Rupiah, ya, Rupiah, ya, per unit, ya. Dan dibawa betul, Pak, bukan namanya Anggota DPR Komisi VII itu adalah dari PT Pos dan PLN. Malah di tempatnya Pak ada di grup WA tempatnya Pak apa namanya Pak Mulyanto TA-nya enggak boleh foto sama Pemdanya, padahal *kan* itu aspirasi kita.

Saya sempat juga satu kali, yang belagu itu, Pak, yang Pak Hafid, yang dianggap konsultan pakai baju rompi ESDM itu belagu banget. Sampai saya pernah bilang kalau itu orang ada di Kabupaten Wajo stop hentikan itu pembagian di Kabupaten, bawa pulang *tuh* barang semua AML itu. Jadi dia dari mana, dari Kementerian ESDM, kamu Kementerian ESDM atau lama-lama, ya, iya, ya, konsultan, saya tahu di Kabupaten Bulukumba, ternyata itu orang yang pernah kita latih barista *gitu*, peserta pelatihannya ESDM, apa, Perindustrian, tapi, enggak dia pakai baju dia jadi konsultan dia diam-diamnya.

Jadi kemudian ini walaupun bukan materi rapat, ya, Pak, untuk karena masih di Bapak di Gatrik bantuan pasang baru listrik. Itu Pak, permainan



tendernya di PLN itu luar biasa, semua yang mendapatkan pemenang-pemennanya adalah keluarga-keluarga orang PLN di dalam. Jadi dia sifat tendernya *tuh*, kalau orang lain mau masukkan harga penawaran tender langsung terblok, jadi yang boleh ikut tender adalah keluarga-keluarga orang PLN ya. Sampai orang PLN pernah datang mau *temuin* saya minta maaf saya enggak mau saya bilang *gitu*. Akhirnya apa dan di dia mereka mengatas namakan itu programnya PLN bukan programnya DPR apa *tuh*, walaupun kita sama-sama Pak siapa, ya, sering, ya, ada juga, ya, peresmian, tapi *kan* enggak peresmian *kan* yang hadir mungkin *cuman* 50 orang, tapi *kan*.

Jadi ini harus ada mekanisme, mungkin, Pak, di stiker Bapak itu jangan hanya logo ESDM yang Bapak tempel, harus ada logo DPR-nya. Yang itu *kan* hanya logo ESDM di BPBL itu, ya, di BPBL itu. Ada Oka enggak? Oh Oka ada di atas ya, yang staf Gatrik yang urusan BPBL itu.

Jadi, ya, sebenarnya ada upayalah untuk memperbaiki dari ESDM, saya objektif *lah*, tapi Bapak juga Bapak *kan* ini Pak Hafid ini *kan* Doktor, ya *kan*. Jadi harus ada upaya-upaya yang memang untuk memperbaiki sistem *monitoring*-nya, Pak, baik BPBL, AML yang mulai sekarang, PJUTS. Anggarannya dari mana untuk realisasikan PJUTS di Dapil saya, ambil dari 100 miliar itu yang saya katakan penyelundupan anggaran yang tidak pernah dibicarakan di DPR tiba-tiba ada 100 M, itu *kan* yang *intangible-intangible tuh* yang enggak bisa disentuh oleh KPK itu, tahulah saya, ya.

Jadi ini, Pak, catatan kami tolong, Pak, diperhatikan dan mudah-mudahan ini bisa lebih baik lagi, ya. Saya harap PJUTS bisa direalisasikan, ini harga diri kami, Pak, kami dibilang pembohong, ya, hanya gara-gara PJUTS ini.

Terima kasih.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,*

Sebelum kita lanjutkan, saya perpanjang dulu waktunya 30 menit sampai 15, sampai 14.15, setuju? Siap.

**(RAPAT: SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

Baik, kembali ke Fraksi.



**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

*Sorry*, Pak Ketua ada tambahan.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Boleh, tapi Pak Bambang dulu, ya, Pak Bambang *udah* minta awal, Pak Bambang, ya, setelah itu Pak Willy sebelum Ibu Mercy lagi, silakan Pak Bambang.

**F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):**

Baik.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII, Pak Dirjen beserta seluruh jajarannya, Bu Dirjen beserta seluruh jajarannya.

Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya kira persoalan terkait dengan pendistribusian AML kemudian realisasi terhadap program aspirasi PJUTS ini hampir-hampir ini di setiap Dapil hampir seluruhnya bermasalah, Pak, dan masalahnya itu hampir-hampir sama *kan* begitu. Ada dari mulai apa namanya pemasangan, ya, pemasangan yang tidak apa tidak berkelanjutan begitu *kan*. Artinya dari mulai penggalian PJUTS itu ditinggal beberapa lama, kemudian berakibat kepada banyaknya masalah baru, kecelakaan orang, anak-anak yang masuk ke lubang dan lain sebagainya, sampai kemudian tidak terpasangnya perangkatnya oleh karena kontraktornya yang kabur dan lain sebagainya, lalu kemudian banyak juga masalah di lapangan karena ternyata kontraktor itu disubkan lagi kepada kontraktor lokal dan sampai akhirnya karena pekerjaan itu berjenjang yang bertanggung jawab menjadi tidak jelas dan akhirnya jadi masalah. Sampai akhirnya tidak terpasang sampai betulah tadi yang dikatakan kawan-kawan itu ada sisa-sisa material itu di lapangan yang sampai hari ini itu tidak terpasang karena kontraktornya sudah pergi, Bu, ya.

Nah oleh karena itu, saya-saya kira ini perlu adanya suatu pembenahan, ya, terutama dari sistem administrasi kita juga tidak tahu kontraktor kontraknya itu seperti apa, kontrak pekerjaannya ini PJUTS, sehingga yang sepemahaman saya bahwa, anggaran PJUTS itu adalah anggaran di tahun 2023. Semestinya itu *kan* harusnya sudah selesai di tahun 2023, bukan *multi-years* tapi ternyata, kenyataannya, faktanya di lapangan sampai dengan hari ini ini masih banyak yang belum terealisasi.



Di tempat saya saja itu baru 19 titik per hari ini, 119 titik, Bu, dari seluruh usulan itu 500, ya, kalau enggak salah, itu sampai hari ini baru 119 titik. Dan itu pun itu upaya yang kita lakukan begitu keras, dikonfirmasi lagi, diawasi dan lain sebagainya, didorong lagi supaya segera dipasang, dan lain sebagainya. Dan betul tadi apa yang disampaikan Pak Nasir kita seperti kehilangan kontak, Bu, kita mau ngomong ke siapa *kan* begitu kontraktor kita enggak *ngerti*, enggak tahu.

Nah oleh karena itu, ke depan saya kira berkaitan dengan komunikasi juga ini perlu di bangun satu apa namanya jalur komunikasi tersendiri yang tujuannya adalah untuk menampung seluruh persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan, Bu, ya.

Kemudian kalau saya lihat lagi bahwa, PJUTS ini setelah terpasang ini menimbulkan masalah baru, Bu. Kenapa? Karena ternyata PJUTS ini setelah terpasang ada juga yang mati dalam beberapa minggu, beberapa bulan, dan seterusnya. Dan ini saya melihat ini tidak ada yang bertanggungjawab *kan* begitu, sehingga sehingga *nih* sampai hari ini kalau kita melihat PJUTS yang sudah terpasang di tahun 2023 banyak yang mati dan itu tidak ada yang mengelola, Pak, tidak ada yang mengawasi.

Nah kita juga perlu tahu saya kira ini kontraknya seperti apa, apakah ada garansinya, garansinya seperti apa *kan* begitu Bu ya. Kalau enggak, ya, harus saya kira harus ada pembenahan, kalau tidak, saran saya barangkali ini harus ada satu kegiatan baru berarti muncul adalah kegiatan perawatan, baik itu pasca garansi ataupun selama garansi. Supaya nanti ketika ada persoalan di lapangan ada PJUTS yang mati, yang bermasalah, dan lain sebagainya, kita sudah tahu kita harus komunikasi ke mana, *kan* begitu.

Sebenarnya PJU ini tidak hanya PJUTS, tapi PJU-PJU yang lain yang terpasang di sepanjang jalan yang itu yang saya pahami sudah menjadi tanggung jawab Pemda itu juga banyak yang mati dan itu pun bermasalah. Kita kontak ke Pemda, ke dinas perhubungan, itu juga sepertinya tidak apa namanya *quick response gitu kan*, seolah-olah itu bukan tanggung jawabnya mereka lagi *kan* begitu.

Nah karena itu ke depan, ya, saya menyarankan bahwa, khusus untuk PJU dan PJUTS ini harus ada lembaga baru, kegiatan baru, di mana kegiatan ini adalah untuk menangani pasca terpasangnya PJU ini, karena kalau tidak ada perawatan ini justru menjadi *kayaknya* menjadi apa namanya bangkai *aja gitu* kalau enggak ada yang apa namanya merawat.

Nah lalu ke depan terkait dengan AML, Bu, Pak Dirjen, ini AML sepertinya di Komisi ini Komisi VII ini saya yang paling sedikit terealisasi, padahal saya yang paling awal pada waktu itu saya ingat saya dengan Bu Ida ada apa namanya peresmian di Cirebon saya sampaikan saya bilang, "Bu kita sudah semua *nih*, mohon dikoreksi barangkali ada yang kurang-kurang *kan* begitu." Seingat saya usulan kita itu sudah lengkap, apa yang apa menjadi



persyaratan apa namanya penerima AML itu sudah kita lengkapi semua, tapi belakangan yang terealisasi hanya 373, terakhir ini, Pak.

Nah oleh karena itu, saya minta penjelasan, ini sebenarnya masalahnya di mana, *kan gitu*, apakah di administrasinya atau di mananya. Sebab di Dapil saya ternyata pendistribusian AML itu bukan hanya dari saya, banyak, Bu, tapi setelah saya telusuri ini juga tidak jelas datangnya dari mana *kan* begitu.

Nah oleh karena itu, saya nanti mohon diperjelas, minta dijelaskan apa yang menjadi penyebab *nih* usulan kita itu tidak terealisasi semua. Karena *buat* saya, Bu, *buat* saya ini, Pak, AML ini menjadi *boomerang*. Mungkin juga *buat* teman-teman lain di Komisi VII *kan* begitu, karena saya lihat di Komisi VII banyak yang tidak masuk ini, Bu. Apakah karena program ini atau karena apa saya tidak tahu karena ini harus dilakukan penelitian juga, tapi di tempat saya ini menjadi masalah buat saya. Ketika AML itu diusulkan kemudian kita ketika kita minta surat pernyataan dan lain sebagainya memastikan bahwa ini akan terealisasi, tapi ternyata yang direalisasi hanya 373, ini menjadi *boomerang* buat kita, Pak, *gitu*. Nah oleh karena itu, saya minta penjelasan yang rinci dan detail apa yang menjadi persoalan tidak teralisasinya usulan kita. Kemudian ke depan saya kira sisa anggaran ini, ya, karena kita sudah memutuskan mengalokasikan anggaran ini untuk program ini, ya, sisa anggaran ini berarti di tahun berikutnya, tahun ini saya kira harus juga direalisasikan kalau bisa untuk program yang sama.

Saya kira demikian Bapak, Ibu sekalian, sekaligus karena mungkin ini pertemuan yang terakhir di bulan puasa, Pak Ketua, ya, dengan ESDM, masih ada? Oh, masih ada, iya. Saya kira demikian, selamat berpuasa bagi yang berpuasa, Pak.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):**

Ya, *makasih* Pimpinan.

Yang kami hormati dan juga teman-teman Anggota, selanjutnya Mitra kami, Pak Dirjen dan Ibu Dirjen, dan Seluruh yang hadir mendampingi Pak dan Ibu Dirjen,

Mungkin karena yang yang terakhir, ya, mungkin nanti Bu Mercy kelihatannya ingin *nambah* juga.

Pertama, saya ingin ingin sampaikan kepada Pak Dirjen dan Ibu Dirjen yang paling penting saat ini *tuh* semangat, Pak, nah itu dulu, Pak, ya. Jadi memang di sini tempatnya, Pak, ya, tempat kita membangkitkan semangat kembali, ya, karena fungsi kami, ya, salah satunya tadi pengawasan, ya.



Saya memberikan catatan dari apa yang disampaikan dari ini sebenarnya karena *curat-marutnya*, ya, dari proyek ini. Ya, mungkin proyek ini salah satu politik anggaran, mungkin bisa seperti itu, kemudian juga ini, ya, mudah-mudahan tidak menjadi bahan untuk 01, 02, 03 *gitu*, ya, tidak dipolitisi *gitu*, ya, harapan kami, ya.

Nah ini hanya kalau melihat dari apa yang disampaikan ini ke tidak artinya kurangnya koordinasi sejak awal, ya. PJUTS maupun AML maupun proyek-proyek lain yang sering kita bincangkan di sini selalu bermasalah, ya. Makanya perlunya ada evaluasi ini menurut hemat kami ini segera untuk menjadi bahan berikutnya, kemudian juga untuk bahan perbaikan, ya. Perbaikan ini masih ada kesempatan, ya, jangan sampai ini menjadi temuan, ya, nantinya karena masih ada masanya, artinya yang menjadi keluhan tadi belum terpasang, kemudian yang rusak, dan sebagainya menurut hemat kami ini di segera di-dilakukan perbaikan, ya. Jadi supaya tidak ada yang mangkrak, ya, kemudian masyarakat juga menunggu-nunggu nyala tadi PJUTS itu juga akhirnya juga nyala, ya. Karena jujur saja kalau kita melihat yang mana lebih bermanfaat dari dua proyek ini ya setelah saya melihat itu memang PJUTS itu lebih banyak manfaatnya karena apa karena dia bisa dinikmati oleh satu kampung, Pak, atau satu RT, ya. Tetapi yang yang AML ini, ya, kalau toh dia bermasalah, ya, dan memang mudah bisa dijual-beli apalagi kalau *pas* dibagi orang yang enggak punya listrik, ya, enggak-enggak ada manfaatnya.

Jadi menurut saya ini pelajaran bagi kita, AML ini sebenarnya Komisi VII enggak usah sebenarnya proyeknya ini kemarin, ya. Kenapa? Karena hampir dikatakan juga tidak berkeadilan *gitu*, karena juga ada banyak orang juga yang tidak punya listrik dan banyak orang juga yang seharusnya dapat tapi enggak dapat *gitu*. Tapi kalau PJUTS itu lebih bagus, ya, saya lebih cocok, lebih mendukung, maka tadi sisa anggaran, Pak Dirjen, saya pikir memanfaatkan untuk melanjutkan kemudian juga kalau bisa untuk memperbaiki, ya. Memperbaiki apa yang tadi kita melihat banyak kekurangan tadi agar semuanya tetap berfungsi, ya, jadi itu yang paling penting, ya, dalam pertemuan ini.

Ya, memang tadi teman-teman agak kencang dan keras, ya, menurut saya, ya, harus dimaklumi dan kami juga mengharapkan, ya, dengan pertemuan evaluasi ini maksudnya untuk segera dilakukan perbaikan-perbaikan, ya. Mengingat ini masih ada satu kesempatan jangan sampai menjadi temuan. Nah kita *udah* paham kalau jadi temuan, ya, ada banyak orang yang dipanggil-panggil *gitu*, ya, yang dipanggil-panggil yang sudah pensiun juga dipanggil, yang sudah tidak jadi Anggota juga dipanggil, jadi kita kecapaian *gitu*, ya.

Maka oleh karena itu Pak Dirjen dan ibu Dirjen dan teman-teman lain kita harus tetap semangat menurut saya untuk memperbaiki hal-hal yang kita evaluasi hari ini. Dan untuk Pak Dirjen Listrik juga saya tetap memberikan semangat, karena memang untuk Kaltim itu saya sudah melakukan koordinasi dengan teman-teman kepala daerah dan juga DPRD, ya, untuk kita segera melakukan rapat evaluasi sekaligus, ya, membahas tentang percepatan



pembangunan listrik desa yang ada di sana, termasuk juga yang paling bermanfaat bagi masyarakat itu kalau mau, ya, Pak Dirjen, lebih banyak lagi membantu masyarakat yang tidak mampu untuk dipasang listrik baru, itu yang paling penting menurut saya.

Itu masukan dari kami, terima kasih dan kami kembalikan kepada Pimpinan.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Terima kasih, Pak Willy. Hari ini Anggota DPR, siapa tahu besok di Pilkada jadi Gubernur Kalteng. Silakan, Bu Mercy.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Baik, terima kasih Pak Pimpinan.

Saya hanya menambahkan saja untuk Ibu Dirjen EBTKE, untuk urusan PJUTS ini, Bu. Pada saat rapat-rapat sebelum kita masuk di masa kampanye itu sebenarnya saya sudah memberikan *stressing* sangat dalam sekali kepada Pak Dirjen yang sebelumnya, bahwa di antara titik lokasi penempatan itu ada yang memang atas kesepakatan dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan dengan pihak gereja, karena ini daerah konflik. Waktu itu sudah saya sampaikan secara terbuka, kita harus segera ini bisa dijalankan begitu anggarannya sudah bisa disahkan, mengapa? Karena ini daerah konflik yaitu di Kabupaten Maluku Tengah, daerah Kariuw.

Waktu itu saya sampai menyampaikan kita tidak saja memberikan kepada Kariuw, tetapi juga memberikan kepada dua daerah yang berkonflik lainnya yaitu Desa Ori dan Desa Pelauw. Saya minta maaf ini saya ulang lagi, karena dalam situasi gelap itu bom-bom molotov masih tetap, apa, dilempar dan seterusnya. Sementara kita juga memberikan kepada desa lain yang sebelumnya menampung ini masyarakat dari Desa Kariuw, yaitu Desa Aboru.

Jadi empat desa ini kita jadikan PJUTS sebagai jembatan perdamaian, ya, kira-kira seperti itu, ternyata tidak selesai juga sampai akhir tahun, ini paling sangat sedih sekali. Pihak gereja bertanya, masyarakat bertanya, kepala desa bertanya, padahal harapannya dengan itu semuanya terang daerah-daerah yang berkonflik ini terang, minimal masyarakat agak hati-hati karena kawasan-kawasan tersebut itu sudah terang-benderang, ternyata tidak selesai jadi saya minta perhatian serius ini, Ibu.

Yang kedua, Ibu, adalah ini berkaitan dengan penempatan salah satu titik lokasi yang lain, yaitu di Universitas Kristen Indonesia Maluku, UKIM. Mengapa? Bukan masalah kristennya, ya, duduk soalnya ini satu universitas ini di dalam kota Ambon itu luluh lantak waktu konflik 99, kesepakatan lagi dengan pemerintah kabupaten dengan Pemdanya waktu itu, dengan semua



pihak, termasuk dengan pihak gereja. Mereka memindahkan pembangunan kampus baru itu ke wilayah Suli di Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Ambon. Lewat dukungan semua pihak akhirnya kampus baru itu sudah dibangun, Bu. Jalan yang masuk dari depan jalan besar sampai ke dalam gelap gulita sampai dengan hari ini. Harapan dari mereka waktu itu kalau ini bisa dipercepat maka minimal kawasan yang ada di situ bisa terang-benderang, jadi peralatan masuk, masyarakat baik muslim maupun kristen yang ikut membantu sebagai tenaga kerja dan yang lain-lain bisa bekerja dengan tenang, ternyata tidak jadi juga.

Jadi ini bukan sekedar kita memasukkan data lokasi hanya karena butuh listrik, tidak, karena ada spesifikasi-spesifikasi tertentu yang mendasari kenapa titik lokasi itu kita tempatkan di sana. Jadi tidak bisa kita pukul rata, ya, Bu, ada di desa A butuh listrik PJUTS masuk di sana, jadi ini, Bu, saya memberikan catatan cukup-cukup sangat ini kepada Ibu sehingga masalah ini bisa cepat terselesaikan dan bisa segera dibangun.

Yang berikut berkaitan dan masalah putus kontrak, untuk kami yang di Indonesia Timur saya tidak tau apakah hanya Maluku atau kawasan Indonesia Timur atau daerah lain. Informasi dari Pak Sekjen, setelah kami berkomunikasi tahun, minggu kemarin ketika surat dikirim, bahwa akan putus kontrak dengan PT Waskita Karya dengan PT Inti, PT Inti itu PT Telekomunikasi, Pak. Urusan radio ini diminta urusan apa urusan punyanya Pak Dirjen AML.

Nah kami punya harapan untuk yang khusus AML ini, walaupun itu diputus kontrak jangan lagi memasukkan BUMN yang lagi sakit parah. Saya baru saja buka ini *searching, statement* resmi per bulan Maret apa Februari 2024 ini telah dirilis resmi oleh Kementerian BUMN 14 perusahaan yang resmi masuk di dalam urusan apa namanya lagi ditinjau karena mereka sakit keras, salah satu di dalamnya PT Inti. Jadi jangan sampai kemudian di-*blacklist* di Maluku misalnya atau di Indonesia Timur dialihkan ke kawasan yang lain. Saya sampai ketakutan jangan-jangan ini uang diterima ada kemungkinan *money laundry* di dalam dan sebagainya, minta maaf kita dari yang tadinya tidak *suudzon*, tidak berpikir yang aneh-aneh *kok* jadinya seperti ini, kenapa diberikan kepada BUMN sakit, *gitu loh*.

Jadi ini juga jadi catatan konkrit kepada pihak Kementerian ESDM kalau putus kontrak, tolong diperhatikan untuk pihak mana pun yang akan mendapatkan ini *qualified, bonafide*. Jangan sampai karena tidak punya tidak, apa Namanya, kurang modal, tidak punya kapasitas di bidangnya akhirnya lari meninggalkan pekerjaan, hancur-hancuran bagi kami di Indonesia Timur seperti ini. Jadi ini dua catatan, ya, yang terus memberi, apa namanya, semacam, ya, sangat mengganggu kami sesungguhnya ini *nih*. Mungkin untuk untuk pihak lain PJUTS itu hanya sekedar penerangan untuk kami *more than* penerangan. Di sana ada unsur kemanusiaan, di sana ada unsur *peace building*, ada unsur manajemen konflik, resolusi konflik, dan lain-lain di sana. Jadi kami sangat berharap ini dapat diselesaikan dengan tepat, dengan cara-cara yang profesional.



Terima kasih.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Terima kasih, Bu Mercy.

Baik, terima kasih Ibu, Bapak, saya kira sudah cukup, ya, sudah kita sampaikan banyak masukannya juga dan masukannya juga kurang lebih, kurang lebih senada, Pak-Pak Dirjen, Ibu Dirjen, mohon maaf. Bahwa memang banyak program yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk PJUTS dan alat masak listrik itu sedianya menjadi salah satu pendorong bagi kita untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, tetapi ternyata karena adanya kendala-kendala di lapangan, itu akhirnya berbuah kepada hal-hal yang sebetulnya tidak diinginkan. Terutama di tahun politik itu amat sangat gampang untuk digoreng, Pak, Ibu. Ya, sehingga memang saya bisa memaklumi, apa, kekecewaan dari rekan-rekan di sini, karena kita setiap hari, Pak, Ibu, setiap hari itu ditegur oleh masyarakat, setiap hari itu dianggap bahwa kita itu melakukan pembohongan kepada masyarakat. Bahwa kita sudah menjanjikan, sudah ada yang dibangun, *precast*-nya sudah ada, tiangnya sudah berdiri, tidak nyala, yang nyala 2 minggu kemudian mati tidak diperbaiki akhirnya kita yang jadi sasaran dari kekecewaan masyarakat.

Termasuk juga AML yang memang pelaksanaannya saya bisa maklumi, Pak, bahwa waktunya memang sangat pendek, ya, sehingga memang segala sesuatunya, ya, boleh dibilang dilakukan secara tergesa-gesa banyak kendala yang terjadi. Tetapi saya mohon, Ibu, Bapak, ini perlu segera dibenahi terutama AML, Pak. Karena janji ini masih *outstanding*, Pak, masih ada kepada masyarakat supaya ini bisa dilaksanakan. Kasihan nanti masyarakat kita nanti merasa tetap bahwa kita ini tetap tidak jujur kepada mereka hanya untuk sekedar menyampaikan berita baik saja.

Nah ini saya kira perlu, Pak, dan data-data yang telah kita sampaikan sebelumnya yang telah disesungguhnya belum sempat divalidasi oleh PLN, belum sempat kemudian dilakukan validasi ke lapangan oleh PLN dan sudah dinyatakan tidak berlaku, itu kami minta untuk bisa dipergunakan Kembali. Karena bagaimana bisa menyatakan itu tidak lengkap dan gugur data-data itu kalau divalidasi saja belum, hanya karena keterbatasan waktu. Mungkin itu tanggapan dan tambahan sedikit dari kami.

Khususnya untuk Ibu Dirjen EBTKE, kami ingin dengar, Bu betul-betul ingin dengar *plan* Ibu ke depannya apa. Kita ini agak terseok-seok *nih*, Bu, dalam proses transisi energi dan menurut saya saat ini agenda kita yang paling penting selain kemandirian energi, ya, transisi ini, karena ini sudah kita, apa Namanya, lewat dari target yang dicanangkan sehingga butuh akselerasi.



Jadi kita butuh pemikiran dari pejabat yang bersangkutan kira-kira apa, Bu, apa pemikiran Ibu yang patut dilaksanakan yang sebelumnya belum dilaksanakan oleh pejabat-pejabat sebelum Ibu *gitu*. Ya, dan ini saya kira *mumpung* kita masih punya masa kerja selama 6 bulan sampai dengan akhir September ini perlu kita canangkan. Paling tidak, Ibu, apa yang dilaksanakan yang tidak bisa diselesaikan dalam masa, apa, masa bakti kami sampai dengan 2024, bisa dilanjutkan berdasarkan kesepakatan dan kesimpulan yang kita capai antara Komisi VII dengan Dirjen EBTKE. *Inshaallah*, Bu, saya tahun 2024 – 2029 kalau tidak ada halangan, tidak ada rintangan saya tetap di sini, jadi akan tetap menjadi mitra Ibu ke depannya *gitu*.

Silakan kalau begitu terima kasih, kami persilakan Pak Dirjen, Ibu Dirjen untuk bisa memberikan tanggapan, singkat-singkat saja, Pak, nanti sisanya kita bisa jawab secara komprehensif, tertulis. Silakan, Pak.

**DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Ir. JISMAN P. HUTAJULU, M.M):**

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Yang saya hormati Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI,

Kami mau merespon secara umum, pertama kami terbuka, ya, dan sangat menginginkan masukan dari Bapak, Ibu, itu yang paling awal dulu untuk perbaikan ke depan.

Yang kedua adalah sebenarnya persyaratan di AML tahun ini mirip dengan BPBL sebenarnya. Pak Mulyanto tadi *udah* menyampaikan, sama persoalannya di awal-awal, iya.

Jadi waktu BPBL pertama, ya, beberapa kendala itu bisa kita berikan *feedback*, bisa kita bisa arahkan. Namun untuk AML ini karena persis kita bisa mulai 20 Oktober selesai untuk penandatanganan kontrak itu 18 Desember, itu hanya 2 bulan, Bu Mercy, hanya 2 bulan. 1 bulan Ibu, Bapak menggunakan, 1 bulan lebih Ibu, Bapak, menggunakan untuk pengumpulan data. Jadi kami persis tidak punya ruang yang cukup untuk memberikan masukan baik itu kepada PLN-nya, baik itu kepada PT Pos nya. Itu-itu mungkin, apa namanya, yang bisa kami tangkap, apa namanya, kenapa banyak terjadi seperti ini.

Intinya tidak ada ruang, tidak ada waktu untuk memberikan *feedback* kepada pengelola di lapangan sehingga terjadilah ini. Kalau waktu BPBL masih ada waktu karena itu *kan* lebih dari 10 bulan. Jadi ada kericuhan di lapangan masuk ke kita, kita adakan rapat, kita berikan arahan, selesai, ini enggak ada. Pada saat tanggal 18 Desember begitu saya tangani calon penerima, apa Namanya, penerima AML ini di pagi hari, di siang hari BPK sudah meminta data itu, Bapak, Ibu sekalian.



Jadi kami sangat perlu kehati-hatian, ya, kami akan selalu taat dengan aturan, ya, untuk *governance* ini, ya. Dan kami bersyukur Bapak, Ibu sekalian, saat ini Irjen dan BPK sudah melakukan audit terhadap pelaksanaan program ini.

Kemudian terkait dengan yang lain mungkin kami sampaikan tertulis. Kepada Pak Bambang Hermato, saya melihat sudah lihat suratnya Bapak dari Pak Hafid untuk menjelaskan kenapa hanya 373 itu, Bapak. Jadi mudah-mudahan kedepan **...(suara tidak ada di rekaman, menit 02:41:16 – 02:41:24)...** melanjutkan ini, AML ini kalau memang ada anggarannya dan kelihatannya di 2025 akan digabungkan antara BPBL dan AML. Dan yang paling, apa sebenarnya, yang berita gembiranya sebenarnya untuk BPBL tahun ini ada ruang untuk menaikkan dari 80.000 ditambahkan sekitar 40.000 nanti atau sekitar 100 miliar lebih akan dialokasikan, mudah-mudahan dengan, apa namanya, dengan dorongan dari Bapak, Ibu bisa-bisa terealisasi dengan baik.

Saya kira itu dulu dari kami, terima kasih Bapak Pimpinan.

#### **F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Pak Ketua, ya. Pertama untuk program AML. Kalau untuk PJUTS, program BPBL karena ini *kan* kita sasar itu rumah-rumah yang belum berlistrik sama sekali, ya, jadi mungkin layak *lah* untuk kalau kita dengan kepala desa untuk mungkin dapat rekomendasi.

Saya punya pengalaman waktu periode 2014 – 2019 dengan Menteri LHK itu pendistribusian alat-alat pertanian/kehutanan, alat-alat besar yang ratusan juta dan kita dapat puluhan unit per orang, entah itu *hand tractor*, entah itu apa-apa segala macam. *Kan* kita enggak butuh urusan dengan kepala desa, cukup dari pihak LHK datang, kemudian CO yang melaksanakan semuanya itu, kita memberikan data kepada langsung kepada Kementerian.

Kalau untuk angka yang sebesar itu *aja* enggak butuh yang aneh-aneh seperti itu, masa *kan* untuk yang AML yang harganya *cuman* berapa ratus ribu rupiah ini harus dipersulit seperti itu, Pak. Ini mari kita bicarakan ini secara baik-baik *gitu loh*. Apa, dan ini urusan AML ini, ini *kan* tidak *ansih* hanya untuk masyarakat miskin, *kan* untuk seluruh masyarakat mana saja yang sudah berlistrik, masyarakat lapisan mana saja yang kita harapkan mereka belum punya AML bisa kita berikan. Jadi bukan yang sangat miskin sekali juga yang mungkin *cuman* 450 watt *kan* tidak mungkin kita kasih.

Jadi sudah tidak murni lagi itu keluarga miskin murni *gitu loh*. Masa *kan* data itu harus diperketat, sementara urusan kita dengan data DTKS dan yang lain-lain itu untuk keluarga yang sangat miskin. Jadi kalau untuk yang program BPBL memang benar, karena itu mereka yang dari gelap gulita kita mau bawa terang ini, pantas mereka disebut sangat miskin. Jadi mungkin ini catatan untuk Pak Menteri, ya, jadi saya kira mungkin ini harus, apa namanya, harus diambil keputusan *aja* supaya jangan tambah *ribet gitu loh*, jangan tambah *ribet*.



Bapak bayangkan, kepala desa tanda tangan, kami yang dari DPR RI itu turun dari rumah ke rumah, kita bayar itu orang-orang kita di bawah. Berapa banyak uang kita keluarkan, kita bukan Menteri sebesar Bapak. Jadi ini juga harus dihargai, Pak. Semua usaha kita dan kerja keras kita hargai turun dari rumah ke rumah, desa ke desa, kabupaten ke kabupaten/kota yang lain. Setelah itu masih minta lagi verifikasi dari PLN, apakah verifikasi PLN tidak cukup? Padahal *kan* PLN yang punya data paling valid, bukan kepala desa. PLN *lah* yang punya data paling valid siapa pelanggan dan bukan pelanggan, masa *kan* data PLN tidak cukup pakai sebagai data. Saya pikir mungkin cukup data PLN *aja* untuk memverifikasi, enggak usah lagi aduh data-data kepala desa *lah*, kepala ini *lah*, nanti kepala desa telepon lagi, kepala dinas telepon camat lagi, jadi tambah rumit di lapangan. Cukup hanya karena ini urusannya AML yang sudah punya urusan basis dengan pelanggan, cukup, apa, *requirement*-nya adalah data verifikasi dari PLN.

Yang terakhir, sebaiknya putus hubungan dengan, putus dengan PT Pos, Pak. Konflik sangat besar, ribut kita semua dengan PT Pos. Memverifikasi data antara kita dengan PT Pos *aja* ributnya minta ampun, mereka tidak mau buka komunikasi sedikitpun. Begitu nanti mau penyerahan baru TA-TA kita pontang-panting menjelaskan ke masyarakat siapa yang dapat dan siapa tidak tanpa ada satu surat resmi pun dari pihak Bapak.

Jadi kalau yang menerima resmi, kami berharap surat resmi keluar sebagaimana BPBL. Surat resmi keluar yang menerima si A, yang tidak menerima si B, apa alasan dan itu resmi, Pak. Jadi data itu bisa kita *compare* dengan data yang diverifikasi oleh PLN dengan yang diterima oleh PT Pos, tapi harapan kita PT Pos ke depan sebaiknya tidak. Langsung saja Bapak utus, Bapak punya orang-orang, siapa yang ada di lapangan, petugas-petugas yang ada di bawah, ataukah CO, atau siapapun mereka saja yang berkoordinasi dengan kita. Sebab kalau tambah lagi lembaga, tambah lagi institusi jadi rumit kita di lapangan hanya untuk AML yang Rp200.000 ini, agak tidak *make sense* dari sisi belanja administrasinya sampai itu barang diterima oleh satu masyarakat kecil di bawah dengan harga dari program itu sendiri.

Jadi kalau kita bedah antara belanja aparatur, belanja administrasi beli barang dan jasa dengan barang yang diterima oleh masyarakat kecil saya enggak tahu jomplang banget. Harapan kita *expenditurnya really* murni semua *direct* dikirim mungkin di atas 80% itu untuk hanya belanja kepada publik, yaitu barang-barang itu sendiri.

Kalau kemudian terjadi sublimasi anggaran, belanja aparatur masuk, belanja BUMN masuk sebagainya, ya, ini jadi beban, Pak. Kita membiayai BUMN atau kita urus kepentingan rakyat kecil? Jadi ini, apa, catatan terakhir dari saya, Pak, urusannya khusus berkaitan dengan, apa namanya, AML.

Yang terakhir, di tahun ini, Pak, tidak ada lagi mata anggaran yang khusus untuk PJUTS, tidak ada lagi mata-mata anggaran untuk yang lain.



Dalam rapat terakhir kita di Badan Anggaran dan rapat terakhir kami kemudian dari Badan Anggaran kita bawa lagi semua hasil keputusan kami, balik lagi ke Komisi. Keputusan dari Badan Anggaran kira-kira di bulan Maret ini akan dibuka lagi pembahasan, Pak, khusus untuk program dari Komisi VII.

Waktu itu janji dari Pak Said Abdullah sebagai Ketua Banggar adalah akan dicari solusi lagi sehingga keputusan yang berkaitan dengan program-program yang tadinya tidak ada alokasi anggarannya mungkin kemudian bisa diperoleh. Waktu itu sementara disisir dari sejumlah mata anggaran, nah kami punya harapan ini harus cepat, Pak. Masuk di kesimpulan rapat dan ini harus cepat, kemudian kita minta RAB tambahan dari mitra-mitra terkait dan ini bisa kita bawa ke, kita bawa ke Badan Anggaran, Pak, sesuai dengan janji di Badan Anggaran pada saat itu, karena kepentingan Pemilu dan lain-lain. Pasca selesai Pemilu bulan Maret anggaran akan disisir lagi dan kemudian alokasi anggaran mungkin akan kemudian bisa dialokasikan.

Saya kira mungkin itu beberapa catatan, Pak, sehingga kita bisa percepat di luar sisa mata anggaran dari AML itu bisa diluncurkan di tahun 2024 atau bahkan ditambahkan sehingga anggaran-anggaran itu bisa kemudian memberi dampak besar program-program yang ada di Dirjen-Dirjen nantinya tidak kosong pada satu mata anggaran tahun 2024 ini.

Saya kembalikan, Pak Ketua. Terima kasih.

**F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):**

Ketua, izin mau menyerahkan ini ke Ibu Eniya *nih*, supaya lihat di mana, baru satu kabupaten di mana semua ini belum-belum dipasang ini PJUTS-nya *nih*.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Baik, kita berikan kesempatan Bu Dirjen untuk bisa memberikan tanggapan, silakan. Singkat *aja*, Bu Dirjen, ya.

**DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Prof. Dr. Eng. ENIYA LISTIANI DEWI):**

Terima kasih.

Bapak Pimpinan Komisi VII yang saya hormati, dan Anggota Dewan Komisi VII yang saya banggakan.

Melihat pertanyaan dan respons dan juga saran, masukan yang sudah kami terima tadi izin nanti menjawab nanti secara detail masing-masing dengan tertulis. Yang bisa saya rangkum sekarang adalah baik kami segera melakukan



evaluasi. Jadi program PJUTS ini agar lebih *sustain*. Saya menyimpulkan bahwa tadi banyaknya masalah operasional, *maintenance*, lalu mungkin *problem* yang ada di lapangan ini memang harus dipikirkan *sustainability*-nya. Dan pada saat ini kami juga ingin berkoordinasi, ya, dengan, karena modelnya adalah bantuan sehingga kami menyerahkannya ke Pemda dan saya rasa untuk mengoperasikan dan *me-maintenance* itu adalah hal yang penting dan ini bisa, harus bisa dikoordinasikan dengan pemerintah lokal.

Dan sebetulnya untuk laporan dan sebagainya kami memang menerima *scan barcode* yang ada di tiang tersebut, tetapi ini mungkin juga nanti akan ada reevaluasi, mungkin saja di lokasi tersebut karena baru ada listrik, ya, tidak mungkin juga *scan barcode gitu*, ya. Nah ini akan kita evaluasi lebih jauh, sehingga informasi tersebut paling tidak mungkin ada *contact person* yang selalu menjadi database bagi kami.

Dan yang kedua adalah proses digitalisasi. Saya rasa proses digitalisasi baik itu urusan *monitoring* maupun pelaporan dan koordinat, lalu mana yang mati, dan lain sebagainya ini mungkin ada perbaikan masalah digitalisasi di pihak kami juga.

Dan mungkin berikutnya kami akan menanggapi sedikit, tetapi ini tadi, ya, yang mungkin tidak terkait dengan PJUTS. Pada saat ini kami sedang akan membahas, jadi besok kami akan melakukan pertemuan dengan Panja pemerintah mengenai pengembangan RUU EBT, EBET dan selanjutnya kita akan diagendakan, ya, dengan DPR itu tanggal 1 April, jadi mohon nanti bisa kami *update* pada saat pertemuan tersebut.

Terakhir mungkin disinggung mengenai HEV-biodiesel. Jadi ini memang sesuai Perpres penentuan HEV-biodiesel itu adalah oleh Menteri dan di dalam ESDM DJ EBTKE yang meng-mengkoordinatori, dan kami juga sedang melakukan reevaluasi dan akan membuat satu pertemuan *multi-stakeholder* untuk membahas perkembangan dari HEV-biodiesel ini.

Mungkin yang terakhir terima kasih Pak Eddy tadi sudah mengingatkan mengenai transisi energi, dan saat ini kami dengan Dirjen EBT, Dirjen Gatrik sedang membahas RUU KN, ya, Pak, ya, RUU KN yang kita telaah kembali dan mudah-mudahan ini merupakan target yang lebih realistis dari skenario sebelumnya. Dan kita saat ini sedang membahas mungkin mohon ada waktu lagi yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan.

Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan.

*Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh,*



Baik, Ibu, Bapak, terima kasih atas tanggapannya yang disampaikan oleh Kementerian ESDM, Pak Dirjen EBTKE, Ibu Dirjen EBTKE, dan Pak Dirjen Gatrik. Sekarang kita masuk ke draf kesimpulan untuk segera kita bisa bacakan dan kita bisa sepakati bersama.

Draf kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen EBTKE dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI. Senin, 25 Maret 2024.

1. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI untuk melakukan percepatan dalam menyelesaikan program penerangan umum jalan, Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) dengan memberikan perhatian khusus kepada wilayah 3T, tertinggal, terdepan, terluar.

Setuju Ibu, Bapak? Pak Dirjen? Ibu-Ibu Dirjen? Ya.

**(RAPAT: SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

Baik,

2. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI untuk melakukan koordinasi dengan pelaksana program PJUTS dalam melakukan perawatan PJUTS guna menunjang keberlanjutan penggunaan PJUTS tersebut.

Ibu, Bapak? Ini dalam rangka perawatan karena banyak di antara PJUTS yang sekarang sudah dipasang ternyata dalam waktu tidak terlalu lama itu mengalami kendala, banyak yang kemudian tidak bisa nyala kembali, tidak bisa operasi tetapi tidak ada program perawatan itu, lambat sekali penanganan perawatannya.

**F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):**

Pimpinan, masukan, ya. Kita *kan* sudah sering melakukan peninjauan terhadap hal-hal yang seperti ini, ya, selalu saja proyek-proyek yang ditangani oleh Kementerian setelah itu masa pemeliharaan maupun pemanfaatan berikutnya itu, itu selalu mangkrak, ya. Selalu, selalu itu artinya hampir semua kejadian. Bagaimana kalau ini diminta untuk diserahkan kepada pihak PLN umpamanya seperti itu atau kepada pihak pemerintah desa atau pemerintah kabupaten untuk menangani.

Nah, ya, lebih bagus seperti itu. Kira-kira ini masukan *aja*, silakan Pak Ketua terima kasih.



**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Tadi Ibu ada yang mau disampaikan? Ibu, silakan.

**DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Prof. Dr. Eng. ENIYA LISTIANI DEWI):**

Izin Bapak, mengenai aset dalam MAK kami adalah hibah ke Pemda sehingga kalau dikerja samakan dengan PLN, PLN saya rasa bisa menggunakan konsep KSO, Kerja Sama Operasi. Namun Kerja Sama Operasi itu biasanya ke koperasi ataupun ke BUMD. Nah ini mungkin nanti di lokasi harus dibentuk koperasi atau BUMD, Pak, Bu. Model yang ada selama ini seperti itu.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Ibu Mercy, silakan.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Ya saya ada tambahan, Pak Ketua.

Untuk yang poin dua ini bahwa, memang ini hibah dan biasanya setiap kabupaten/kota, Pemda yang menerima bantuan PJUTS ini mereka harus tanda tangan berita acara serah terima, *commitment letter*, dan yang lain-lain. Nah ini yang tidak diungkapkan ke publik karena biasanya *commitment letter* itu kita fasilitasi saja, tetapi itu G2G, ya, antara pemerintah dengan pemerintah *gitu loh*, masyarakat di luar sana mereka enggak tahu. Nah sementara pemerintah kabupaten/kota juga masa bodoh dan malas tahu, padahal mereka *udah* tanda tangan semua berkas-berkas dokumen itu.

Jadi saya pikir mungkin untuk yang poin kedua ini dan ini memang cukup banyak lampu yang PJUTS yang memang sudah habis masa kadaluwarsanya, sudah harus diganti, dan seterusnya, mungkin harus ada pendataan dulu *lah buat* saya. Sesudah itu khusus untuk alokasi anggaran perbaikannya, Pak, karena *kan* kita *kan* ada tanda tangan berita acara dan *commitment letter* dari setiap kabupaten, Pemda kabupaten/kota, nah kalau mereka memasukkan dari kementerian memasukkan anggaran apakah ini enggak jadi temuan nanti ke BPK atau KPK saya enggak tahu karena ini *kan* sudah penyerahan serah terima seperti itu.

Kalaupun misalnya ada alokasi anggaran yang diberikan, isi dari *commitment letter* dan serah terima barang itu, itu juga harus detail disebutkan. Kalau misalnya kementerian kita dorong untuk juga bisa ambil bagian, maka juga tidak ada pilihan lain *gitu loh*. Karena memang sejumlah wilayah-wilayah



menerima program-program seperti ini rata-rata kabupaten/kota yang APBD-nya kecil sekali, bahkan ada yang di bawah 500 miliar, di bawah 800 miliar. Sementara mereka urus ratusan tiang-tiang seperti begini juga rasanya banyak juga yang masih ada jadi kebutuhan di kabupaten/kota.

Jadi saya pikir ini untuk program per tahun ini dan seterusnya mungkin yang paling masuk akal di poin 2 ini adalah sebelum mendesak untuk, sebelum melakukan koordinasi mungkin yang paling penting dan mendesak adalah mengevaluasi dan mengkaji ulang isi dari berita acara dan *commitment letter*, itu mungkin yang paling penting. Karena enggak ada gunanya kita mendesak-desak, apa namanya, koordinasi pelaksana PJUTS. Mereka punya waktu untuk *maintain cuman* paling 3 bulan sesudah itu selesai, terus masyarakat dan kita mau larinya ke mana. Iya, apa isinya bahasanya saya lupa itu namanya itu berita acara dan satu lagi ada beberapa lembar *commitment letter*, ya, BAST iya *he'eh* itu dia, Pak, itu, iya itu mungkin yang paling penting.

**F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):**

Izin, Pimpinan.

Iya, jadi saya sepakat apa yang disampaikan Bu Mercy tadi terkait dengan poin dua itu kalau kita hanya mengkoordinasi ini *kan* rasa-rasanya kurang tegas begitu, kalau kita melihat hasil kerjanya di lapangan justru ini harus dievaluasi. Nah evaluasi itu bukan hanya terhadap hasil kerjanya, tetapi juga kepada kontrak kerjanya, Pak. Jadi kalau kontrak kerjanya enggak dievaluasi, saya kira tidak akan ada perubahan.

Maka itu saya pikir ini kata-kata evaluasi harus ter, harus *state* tertulis di situ tegas, ya, supaya, apa, implementasinya di lapangan itu juga bisa tegas *gitu*. Saya kira demikian.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Pak Ketua, tambah Pak Ketua. Jadi mengevaluasi, mengkaji satu data seluruh PJUTS bermasalah, koma, mengkaji ulang isi dan berita acara serah terima dan seterusnya, serta melakukan koordinasi dengan pelaksana. PJUTS bermasalah, kemudian pihak ketiga.

Sebenarnya kalau melakukan koordinasi tidak dengan pelaksana, tetapi dengan pemerintah kabupaten/kota yang telah melakukan tanda tangan berita acara per tahun kemarin, ya, melakukan koordinasi. Sementara untuk yang evaluasi, evaluasi pihak ketiganya. Jadi PT Inti atau PT Waskita Karya apapun dievaluasi *aja* semua, tadi kalau *udah* kesepakatannya *blacklist*, *blacklist aja* semuanya *gitu loh*.



**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Sebentar dulu, coba saya ulang lagi, ya.

Komisi VII DPR RI mendasak Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI mengevaluasi, mengevaluasi dan mengkaji dan mengkaji, coba *deh*, dan mengkaji seluruh data PJUTS bermasalah, mengkaji ulang isi dari acara, berita acara serah terima dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan, bukan pemerintah daerah saja *kan* ini *kan* dengan, apa namanya, *kan* dalam masa perawatan pun sudah sering terjadi kendala. Jadi sebelum diserahkan kepada Pemda itu pun sudah ada kendala, sudah ada kerusakan, sudah ada, apa Namanya, PJUTS yang tidak berfungsi, jadi tidak hanya dengan Pemda saja.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Pak-Pak Ketua itu ada masih kurang, Pak Ketua. Seluruh data PJUTS yang bermasalah, pihak pelaksana, iya pihak ketiga apa namanya *lah*, pihak, apa namanya, penanggung jawab program, pelaksana atau apalah.

**F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):**

Jadi, Pak pimpinan.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Ayo, siapa yang tolong ini. Sebentar-sebentar, kita tambahkan dulu ini. PJUTS yang bermasalah, koma, tambah lagi, pihak kontraktor, pihak pelaksana proyek misalnya, pelaksana proyek, koma, iya.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Pak Bambang.

**F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):**

Ya, jadi saya kira Pak Pimpinan, ini bukan hanya mengkaji ulang isi daripada berita acara serah terima, Pak, karena itu menjadi bagian daripada isi kontrak kalau berita acara serah terima itu. Jadi yang harus dikaji ulang itu adalah isi daripada kontraknya. Kontraknya apa, sampai sejauh mana, jadi saya kira ini harus di-*state* di situ adalah mengkaji isi daripada kerja sama, Pak, MOU itu, kontrak itu, Pak. Kalau berita acara serah terima itu adalah turunan daripada isi kontrak itu, Pak.

Jadi yang harus dikaji itu dengan kondisi yang sekarang hasil kerjanya mereka adalah isi kontraknya, sebenarnya isi kontraknya *gimana sih, kan*



begitu. *Kok* sampai, apa, anggaran 2023 sampai hari ini *kok* masih belum selesai *kan* begitu. Ada enggak *sih punishment* di situ, *kan gitu*, *kok* masih tetap jalan, *kan gitu*. Seperti apa maka itu harus di-*state* di situ adalah isi kontraknya, mengkaji ulang isi kontrak kerja, isi kontrak kerja.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Coba saya ulang ya, jadi, Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI mengevaluasi dan mengkaji, tolong mengevaluasi dan mengkaji, seluruh data PJUTS yang bermasalah, pihak pelaksana program, mengkaji ulang isi dari kontrak program pemasangan PJUTS termasuk berita acara terima, serta melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan perawatan PJUTS guna menunjang keberlanjutan penggunaan PJUTS tersebut.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Pak-Pak Ketua *udah* bagus, mungkin di pihak pelaksana program mungkin ditambah pihak ketiga pelaksana program, kalau nanti bisa dipikir ini nanti orang kementerian, padahal yang kita sasar ini *kan* sebenarnya mereka yang menang tender ini. Ya *makasih*, saya kira *udah* mantap.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Ibu-Ibu Dirjen? Ya, setuju, ya, oke biar kita ketok.

**(RAPAT: SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

Baik.

3. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI memanfaatkan program, melakukan evaluasi terhadap persyaratan dan mekanisme penerima manfaat program alat masak listrik bagi rumah tangga agar program ini dapat dijalankan kembali tanpa hambatan yang berarti.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Pak Ketua, saya kira evaluasi sudah kita lakukan. Jadi kenapa kita tidak langsung *straight to the point aja*, Komsii VII mendesak Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM untuk tidak lagi memasukkan persyaratan rekomendasi dari kepala desa sebagai persyaratan, salah satu persyaratan penerima bantuan AML.

**F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):**

Bu.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Gini aja kalau gitu.*

**F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):**

Pimpinan, sebentar. Ini *kan* di dalam kontraknya ada hibah, Pak, ya. Hibah ke aset ini dihibahkan ke *anu*, ya, ke-ke pemerintah desa apa pemerintah daerah, Bu? Izin interaktif. Hibahnya itu ke pemerintah daerah apa ke pemerintah desa? Ke Pemda apa ke pemerintah desa, Pak? Bukan-bukan-bukan ini PJUTS masih, oh sudah AML, ya. Tadi-tadi yang PJUTS, *sorry*, Pak, lupa saya, Pak, yang PJUTS itu *kan* dihibahkan ke daerah, ada suratnya, Bu, ya, itu ya? Surat hibahnya *gitu* maksudnya, ada? Sebab perasaan saya pada saat proses itu kita tidak pernah membuat surat itu, *kan gitu*. Apakah dibuatnya setelah terealisasi atau bagaimana? Sepanjang sepengetahuan saya ketika ada hibah itu, itu di-dibuatnya di awal.

**DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Prof. Dr. Eng. ENIYA LISTIANI DEWI):**

Izin Pak, kalau penyerahan dengan pagu hibah itu biasanya setelah *commissioning* dan setelah itu ada audit BPK, baru ada berita acara serah terima, sehingga mungkin pada saat, apa namanya, peresmian atau penyerahan secara simbolis itu belum ada berita acara.

**F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):**

Sepanjang ini apa di-dibuatkan atau tidak, Bu, itu? Belum ada ya? Karena *kan* ini berpengaruh, Bu, kalau-kalau PJUTS itu dihibahkan ke pemerintah daerah itu berarti tanggung jawabnya sudah pindah ke daerah *kan* begitu. Secara otomatis ketika ada perbaikan, pemeliharaan, dan lain sebagainya itu menjadi tanggung jawabnya daerah. Nah maka ketika ada persoalan di lapangan kita enggak segan-segan *ngomong* ini PJUTS *kan* sudah dihibahkan *kan* begitu, saya minta diperbaiki dan lain sebagainya *kan* bisa, Bu, seperti itu. Tapi kalau belum ada suratnya ini *kan* kita juga jadi enggak bisa, apa namanya.

**DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Prof. Dr. Eng. ENIYA LISTIANI DEWI):**

Ya, izin. Pada saat penyerahan simbolis biasanya ada BAST sementara, Pak. BAST sementara dipegang dan pada saat itu kami sudah komunikasikan ke pihak Pemda, namun mungkin detail tadi BAST mungkin itu belum dipahami atau hal-hal seperti itu akan kita evaluasi. Dan saya rasa di dalam kontrak sebetulnya asuransi itu 2 tahun, 2 tahun yang harus diperbaiki oleh penyedia. Jadi kalau misalnya ada mati lampu dalam waktu 2 tahun sebetulnya itu tanggung jawab penyedia.

**F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):**

*Gitu, ya, 2 tahun, ya.*

**DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Prof. Dr. Eng. ENIYA LISTIANI DEWI):**

Dan iya, dan setelah ada BAST biasanya kalau setelah audit itu pertengahan tahun, Pak, ya, iya setelah BPK masuk *kan*. Setelah BPK masuk itu misalnya kalau sudah selesai di Desember biasanya Maret itu sudah selesai audit dan di situ kita bisa membuat BAST yang, *anu*, yang asli *gitu*.

**F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):**

Jadi, Bu, maksudnya penyerahan itu ada, ya? Ke-ke, penyerahan aset.

**DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Prof. Dr. Eng. ENIYA LISTIANI DEWI):**

BAST sementara ada.

**F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):**

Penyerahan aset *kan* judulnya, begitu.

**DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Prof. Dr. Eng. ENIYA LISTIANI DEWI):**

Betul, iya semuanya.

**F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):**

Baik.



**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Lanjut, ya. Jadi bisa disepakati ini?

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Ketua, tambah satu kata, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Apa itu?

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Poin 3, rumah tangga bagi rumah tangga khususnya persyaratan rekomendasi dari kepala daerah agar dihilangkan, supaya program ini dapat dijalankan kembali tanpa hambatan yang berarti.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Agar dihilangkan.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Agar dihilangkan, tambah dihilangkan, agar dihilangkan sehingga, ya, program ini dapat dijalankan kembali tanpa hambatan yang berarti. Jadi cukup hanya menggunakan dan verifikasi dari PLN, data pelanggan PLN.

*Makasih.*

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Pak Dirjen bagaimana, Pak Dirjen?

**DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Ir. JISMAN P. HUTAJULU, M.M):**

Bu Mercy, sebenarnya kami mau mengevaluasi, Bu, ya, tapi dalam evaluasi ini kami harus melihat dulu kalau itu dihilangkan dampaknya seperti apa karena itu *kan* hibah, ya. Apakah melanggar aturan *gitu*, ya, karena itu nanti hibah. Ya, juga kepada masyarakat kami khawatirnya di situ, tapi kalau. Kam-kami sepakat, ya, apa namanya, kalau memang itu bisa dihilangkan kita



kami akan hilangkan, Bu. Tapi kalau memang itu sudah persyaratan dalam aturan, ya, itu menjadi.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Pertanyaannya, persyaratan itu datangnya dari mana, Pak? Ini dibuat di internal, kalau ini hanya dibuat internal saya menganggap kepala desa tidak kompeten untuk memberikan rekomendasi. PLN yang punya kewenangan mengeluarkan rekomendasi, siapa yang menjadi pelanggan dan siapa yang bukan pelanggan *that is the point* sederhana itu, Pak.

**DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Ir. JISMAN P. HUTAJULU, M.M):**

Bu Mercy, kami mendapatkan informasi itu persyaratannya dari Peraturan Menteri Keuangan PMK, Bu.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Untuk program ini, Pak?

**DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Ir. JISMAN P. HUTAJULU, M.M):**

Untuk yang sifat-sifatnya yang diberikan hibah kepada masyarakat, ini *kan* hibah, Bu.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Apakah semua hibah begitu? Dalam pengalaman kami tidak semua hibah demikian, hibah Kementerian Keuangan ke masjid, ke gereja, enggak butuh itu rekomendasi kepala desa. Ada banyak sekali program-program hibah yang kami urus, Pak, dari Kemenkeu dan tidak butuh bantuan, bantuan CSR banyak yang hibah dan tidak butuh, tidak butuh rekomendasi kepala desa.

**F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):**

Izin, Pimpinan.

Enggak apa-apa ini tetap, ini *kan* kesimpulan kita ingin mendesak nanti urusan belakangan Bapak pelajari, enggak apa-apa ini jadi kesimpulan rapat bahwa agar dihilangkan, ya, *gitu* ya, Pak, ya.

**DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Ir. JISMAN P. HUTAJULU, M.M):**

Usulan, ya, Bu Mercy, ya, nanti kami akan lihat lagi *gitu*, ya. Baik

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Ya, karena *kan* tadi masalah *kan* di sini *kan* kita cantumkan melakukan evaluasi, Pak, terhadap persyaratan. Jadi Bapak silakan melakukan evaluasi terhadap ini, *gitu*, Pak, ya. Dan yang kita ingin evaluasi adalah rekomendasi kepala daerah itu, karena memang pada prosesnya dalam di lapangan itu sangat menyulitkan, tetapi ketika nanti Bapak lakukan evaluasi dan ternyata itu melanggar PMK itu tentu bisa kami bisa kami terima.

**DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Ir. JISMAN P. HUTAJULU, M.M):**

Siap, terima kasih, Bu Mercy.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Bisa saya ketok, ya, Pak, ya?

**DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Ir. JISMAN P. HUTAJULU, M.M):**

Siap.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Baik.

**(RAPAT: SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terus.

4. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI untuk merealisasikan 2 8.290 titik PJUTS yang menggunakan APBN Tahun Anggaran 2024 melalui realokasi anggaran sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.



Silakan, ada masukan?

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Pak Ketua, untuk program PJUTS yang ada ini mungkin kita *bikin* dua tahap, Pak Ketua, untuk bagian ini. Tahap yang pertama kita minta data konkret mana yang sudah terpasang dan mana yang belum, data detail. Mungkin wilayah Indonesia Timur sebagian besar sudah, sebagian besar tidak terpasang, nol yang terpasang, tapi di beberapa tempat yang lain mungkin sudah ada yang sudah terpasang.

Yang berikut kita minta juga kejelasan berapa uang yang telah dipakai untuk program PJUTS ini sebelum meluncur ke 2024. Kita enggak bisa terima mentah-mentah seperti begini, Pak Ketua, karena kita juga ingin dengar sanksi kepada pihak ketiga yang tidak bisa melaksanakan komitmen proyeknya dengan kontraknya ini dengan benar terus mereka *diapain, kayak gitu loh*. Apakah mereka mengembalikan uang ataukah bagaimana? Ini kita tidak jelas. Sehingga kita butuh seluruh catatan langkah-langkah itu baru sesudah itu kita hitung, Pak. Kita hitung dari yang meluncur tahun kemarin berapa banyak yang belum terpasang, sesudah itu mungkin dalam percakapan nanti dengan Badan Anggaran kita tambahkan untuk yang masuk di tahun 2024 ini, Pak.

Jadi kita tidak bisa seperti memutihkannya aja tiba-tiba meluncur 2024 semua anggaran yang di, tanpa kita tahu apa isinya, mungkin itu atensinya, Pak.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Bu Dirjen, ada masukan?

**DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Prof. Dr. Eng. ENIYA LISTIANI DEWI):**

Baik, Bapak, izin.

Yang pertama mengenai realokasi anggaran ini karena tidak ada di Dirjen EBTKE realokasi anggaran yang akan disesuaikan itu adalah berada di bawah Sekjen, sehingga mungkin di situ Dirjen EBTKE-nya dihilangkan, lalu langsung ke Kementerian ESDM RI.

Yang kedua, untuk merealisasikan 8.290 titik itu kita sepakat nanti mengevaluasi titik mana yang belum dipasang sehingga angkanya mungkin tidak perlu diulis, jadi kita menyelesaikan sisa, sisa dari titik PJUTS yang belum terpasang untuk pada tahun 2023.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Waduh, jangan dihilangin.

**DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Prof. Dr. Eng. ENIYA LISTIANI DEWI):**

*Gimana Bu, izin?*

**F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):**

Ini karena angka itu *kan* dari Kementerian juga, saya *sih* menyalin di situ.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Pak Ketua, tadi *kan* saya sudah usul, Pak Ketua. Kalau boleh Komisi VII DPR.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Angka mungkin anggarannya, anggaran, tapi kalau angka 8.250 ini *kan* ada di materi presentasinya Ibu.

**DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Prof. Dr. Eng. ENIYA LISTIANI DEWI):**

Iya, tapi itu angka prognosa, Pak, izin, prognosa yang sampai tanggal besok 30 Maret, perkiraan 30 Maret sehingga mungkin di sini, ya, mungkin bergerak sedikit *sih*.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Pak Ketua, kita kalau baca poin 4 ini kesannya seperti anggaran ini ada di dalam anggaran APBN tahun 2024, ini *kan* anggaran yang belum ada, *kan*, Ibu? Anggaran PJUTS ini tidak ada di tahun 2024 ini *kan*?

**DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Prof. Dr. Eng. ENIYA LISTIANI DEWI):**

Iya, sebelumnya tidak ada.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Ya, tidak ada.

Jadi mestinya bahasanya, Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap realisasi 8.290 titik PJUTS Tahun Anggaran 2023, itu dulu baru kita bisa bicara realokasinya di 2024 jangan digabung, *entar* nanti jadi salah *gitu loh*.

Terhadap realisasi, terhadap realisasi 8.290 titik PJUTS tahun TA APBN 2023, iya, koma, iya, memberikan, melakukan evaluasi kemudian menyiapkan, apa, ya, bahasanya, menyiapkan penjelasan detail terhadap seluruh penggunaan anggaran proyek, iya, PJUTS TA, ya, 2000, mungkin itu poin A, 4A, 4B-nya baru itu dilakukan menggun relokasi dan seterusnya itu, Pak.

Empat, 4A ini kemudian 4B-nya, poin keduanya dari poin 4 ini, ya, enggak-enggak usah Komisi VII lagi karena ini *kan* poin A poin B langsung *aja* atau, ya, terserah *aja*. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen EBTKE Kementerian ESDM untuk menyiapkan semacam apa, ya, rancangan anggaran relokasi, realokasi PJUTS dalam Tahun Anggaran 2024, ini baru kita bisa bawa ke rapat dengan Pak Menteri atau dengan Sekjen, Pak.

Kita enggak bisa di sini karena rapat dengan Dirjen kita enggak bisa taruh Sekjen di sini, Pak. Alokasi anggaran, ya, demikian, Pak.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Nomor 4 dulu.

4. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap realisasi 8.000, 8.290 titik PJUTS.

Ya, ya, ya betul, ya betul-betul, ya.

4. Menyeluruh terhadap realisasi keseluruhan PJUTS APBN Tahun Anggaran 2023 dan komanya dihilangkan dan menyiapkan penjelasan detail terhadap seluruh penggunaan anggaran PJUTS APBN dengan menggunakan APBN Tahun Anggaran 2023.

Itu di hilangkan dulu *tuh anunya* seluruh terhadap seluruh anggaran, penggunaan anggaran, enggak, *no-no-no-no* di atasnya 2023 komanya diganti dan *nah* dan menyiapkan penjelasan detail terhadap seluruh anggaran PJUTS APBN dengan APBN Tahun Anggaran 2023, Bu Dirjen?

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Pak Ketua, mungkin di dalam kurung untuk anggaran bukan saja anggaran yang keluar dari kementerian tapi anggaran *projek* yang-yang kami, apa namanya, kejar ini sebenarnya anggaran *projek*. Karena ada pihak ketiga mungkin yang sudah terima uang mereka tidak mengerjakan di lapangan



padahal uang sudah terlanjur keluar dari kementerian, barang mereka tinggalkan begitu saja dan setusnya mereka hilang tanpa jejak, Pak. Atau lubang-lubang sudah digali tapi kemudian tidak ada apa-apanya di lapangan. Jadi mungkin ditambahkan di dalam kurung, jadi anggaran dalam kurung, ya, anggaran proyek, ya.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Eenggak, itu anggaran dalam kurun proyek.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Ya, gitu loh, proyek, ya.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oke, Bu Dirjen *gimana?*

**DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Prof. Dr. Eng. ENIYA LISTIANI DEWI):**

Izin, PJUTS TA 2023 saja *gimana*, Pak? Yang terakhir itu dengan menggunakan APBN TA 2023 seperti kelebihan kata-kata, ya? Agak rancu, ya? Dan menyiapkan penjelasan detail terhadap seluruh penggunaan anggaran proyek PJUTS TA 2023, bagaimana?

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oke.

**DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Prof. Dr. Eng. ENIYA LISTIANI DEWI):**

Dan izin sedikit menjelaskan, dalam kontrak proyek kami itu yang dibayar adalah yang sudah terpasang, menyala, betul, iya, baik.



**F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):**

Maksudnya Bu Mercy, Bu, yang sudah dibayar tuh berapa?

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Tapi *kan*, Ibu, meskipun Ibu bayar yang sudah terpasang tetapi yang kemudian ini yang sudah, yang sudah dikerjakan dan kemudian jadi mangkrak itu tercatat apa nanti, Ibu. Meskipun belum bayar tapi *kan* ada komitmen yang belum, yang tertahan *gitu loh*, ada *contingent liability* yang masih belum diselesaikan saya kira itu penting *tuh*, Bu, untuk kita ketahui. Setuju, ya, Bu, ya, setuju, Ibu, Bapak ya? Oke, baik.

**(RAPAT: SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

5. Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian ESDM RI untuk menyiapkan, menyiapkan alokasi anggaran, menyiapkan tolong diubah, menyiapkan alokasi anggaran APBN tahun, Tahun Anggaran 2024 yang dapat digunakan dalam merealisasikan 8.203, 8.290 titik PJUTS Tahun Anggaran 2023.

Itu mungkin *anu aja*, ini *kan* Ibu bilang angkanya bisa bergerak, ya, 8.290, ya?

**DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Prof. Dr. Eng. ENIYA LISTIANI DEWI):**

Mungkin untuk menuntaskan realisasi PJUTS-nya, TA 2023.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Pak Ketua, ini *kan* sekaligus *kan* kita mau bawa usulan kita *kan* ke Banggar, sesuai dengan hasil keputusan Banggar waktu itu.

Jadi saya usulkan untuk menyiapkan alokasi anggaran TA, untuk menuntaskan PJUTS yang belum terealisasi saya enggak tahu apakah kita supaya jangan dikunci apakah kita ingin menambahkan lagi yang punya tahun ini atau tidak, karena tahun ini *nih* kosong, Pak, dan ini mau dialokasikan dalam percakapan dengan Badan Anggaran.

Jadi saya kira untuk menuntaskan titik-titik PJUTS yang belum teralisasi, koma, dan program-program kemasyarakatan lainnya yang diharapkan dapat dialokasikan dalam-dalam, dapat dikoordinasikan lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mungkin itu *aja*. Yang dapat dialokasikan, jangan dikoordinasikan, yang dapat dialokasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Coba saya ulang lagi nomor, nomor 5 ya.

5. Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian ESDM RI untuk menyiapkan alokasi anggaran APBN Tahun Anggaran 2024 untuk menuntaskan titik-titik PJUTS yang belum terealisasi dan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat yang dapat dialokasikan sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan ketentuan undang, perundangan yang berlaku.

Ibu, Bapak, bagaimana?

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Setuju, Pak.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Setuju, ya, oke baik.

**(RAPAT: SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Pak Ketua, sebelum yang paling terakhir ini saya ada satu usulan, Pak, ini yang paling krusial yaitu, Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian ESDM RI untuk segera mem-*blacklist*, karena ini *kan* baru permintaan baru isi pembahasan, ini harus masuk di dalam kesimpulan kita, mem-*blacklist* perusahaan pihak atau pihak ketiga BUMN perusahaan apapun namanya saya enggak tau, pihak ketiga yang, apa, ya, bahasanya, tidak *well perform* atau tidak.



**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Yang gagal, ya.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Yang tidak dapat memenuhi isi kontrak kerja sama dengan pihak Kementerian ESDM RI, ya, apapunlah, *he'eh*, isi kontrak pekerjaan dengan pihak Kementerian ESDM RI yang nyata-nyata telah merugikan kepentingan masyarakat. Yang telah merugikan kepentingan masyarakat, ya, dan kita minta bila perlu dirilis atau diumumkan ke kami ke Komisi VII pada waktunya nanti.

*Makasih, Pak.*

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Ini saya tambah, ya.

6. Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian ESDM RI untuk memberikan sanksi tegas, untuk memberikan sanksi tegas termasuk mem-*blacklist*, sanksi tegas, termasuk mem-*blacklist* pihak ketiga yang tidak dapat memenuhi isi kontrak pekerjaan dengan pihak Kementerian ESDM RI yang telah merugikan masyarakat dan negara.

Ibu, iya.

**DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Prof. Dr. Eng. ENIYA LISTIANI DEWI):**

Mohon izin, sanksi tegas termasuk mem-*blacklist* pihak ketiga sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oke, ya, *udah* pokoknya enggak apa-apa.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Sesuai peraturan saja diselipkan.



**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oke. Jadi yang telah merugikan masyarakat dan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *gitu*, ya, Bu ya? Baik, ya, ketok.

**(RAPAT: SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

*Udah*. Terakhir,

7. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen EBKTE dan dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 1 April 2024.

Setuju Ibu, Bapak? Setuju, ya.

**(RAPAT: SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

Baik, terima kasih.

Demikian Ibu, Bapak.

**F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):**

Izin Pak, izin Pimpinan.

Saya setuju semuanya, tapi dalam jawaban tertulis saya mau jelaskan saya perbedaan harga soal contohnya Miyako Ini kenapa itu 120.000 dikali Rp120.000 dikali 100.000 berapa miliar itu.

**DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (Ir. JISMAN P. HUTAJULU, M.M):**

Siap, Bu Andi.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Baik kalau *gitu*, baik terima kasih Ibu, Bapak sekalian dan demikian kami akhiri Rapat Dengar Pendapat beserta, bersama-sama dengan Dirjen EBTKE dan Dirjen Ketenagalistrikan.



Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu, Bapak Anggota Komisi VII yang telah hadir dalam kesempatan ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Dirjen EBTKE dan Dirjen Ketenagalistrikan ESDM Kementerian ESDM RI beserta seluruh jajarannya yang telah menghadiri Rapat Dengar Pendapat pada hari ini dan dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* bersama ini, bersama ini kami nyatakan Rapat Dengar Pendapat ditutup.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT: SELESAI)  
(KETOK PALU 3 KALI)  
(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.57 WIB)**

**a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,**

**Dwiyanti, S.Sos.  
NIP. 196903131990032002**

